

**RENCANA STRATEGI
PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2021-2026**



KABUPATEN GOWA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan , karena atas Rahmat dan Taufik-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen yang penting dalam Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berupa Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini dapat disusun sebagai pedoman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan berdasarka target sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa telah diselaraskan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, sehingga sasaran dan target capaian kinerja telah sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan kebijakan pendukung terkait lainnya. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang dihapakan dapat mempermudah pencapain target kinerja pembangunan yang akan dicapai oleh kepala daerah sampai dengan tahun 2026 Selain itu dengan adanya keselarasan Renstra dengan RPJMD diharapkan terdapat efisensi anggaran sehingga anggaran yang benar-benar digunakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentan Pemerintah daerah bahwa urusan pangan merupakan urusan wajib non pelayann dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sampai dengan individu sehingga terwujud ketahanan pangan di kabupatern gowa. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012 bahwa defenisi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dri tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak



bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Resntra Dinas Ketahanan Pangan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi aparat dan pihak terkait agar apa yang dicitakan dapat terwujud sebagaimana mestinya dan Allah SWT senantiasa merdhoi kita semua Amiin.. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sungguminasa, 15 Juni 2023

KEPALA DINAS,



H. Syamhari Rasvid, S.Ag. MH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19770917 200312 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISIiii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Umum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktu Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Dinas	37
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas.....	46
2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan	64
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Lingkungan Analisis Internal.....	69
BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	72
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	72
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	78
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra terkait dengan tugas fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	82
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strtegis (KLHS)	87



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis pelaksana tugas dan fungsi pelayanan SKPD.....	91
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	95
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	104
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	114
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	131
BAB VIII PENUTUP.....	135



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten gowa	37
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupten Gowa.....	38
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.	40
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa	41
Tabel 2.5 Susunan Kepegawaian Yang Telah Mengikuti Diklat.....	43
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupten Gowa.....	44
Tabel 2.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.....	45
Tabel 2.8 Data Ketersediaan Energi Per Kapita Per Hari Tahun 2016 s.d 2020..	50
Tabel 2.9 Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 -2020.....	51
Tabel 2.10 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020..	52
Tabel 2.11 Data Rata2 Harga GKP Tk. Penggilingan, GKG Beras Medium dan Beras Premium Tahun 2020.....	53
Tabel 2.12 Perkembangan Pola Komsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	54
Tabel 2.13 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020..	55
Tabel 2.14 Hasil Pengujian Sampel Pangan Berdasarkan Uji Laboratorium Keamanan Pangan Tahun 2016-2020	56
Tabel 2.15 Capaian Target Indikator SDGs/TPB Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.....	58



Tabel 2.16	Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.....	59
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.....	61
Tabel 2.18	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa	62
Tabel 2.19	Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa	63
Tabel 2.20	Komparasi Capaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa terhadap Sasaran Renstra K/L Badan Ketahanan Pangan Kementerian dan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Selatan.....	66
Tabel 2.21	Hasil Telaahan Struktur Ruang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa...	68
Tabel 2.22	Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten Gowa.....	69
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	73
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	75
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas.....	76
Tabel 3.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	77
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Dalam Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Perangkat Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	81
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	83
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	



	Keberhasilan Penanganannya.....	86
Tabel 3.8	Permasalahan Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	88
Tabel 3.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	90
Tabel 3.10	Perumusan Isu Strategis Pada Perangkat Daerah.....	94
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.....	99
Tabel 4.2	Visi: Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik	102
Tabel 4.3	Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.....	103
Tabel 5.1	Faktor Internal dan Eksternal.....	106
Tabel 5.2	Strength, Weakness, Opportunity, and Threats (SWOT).....	106
Tabel 5.3	Matriks Analisis SWOT.....	109
Tabel 5.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.....	112
Tabel 5.5	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.....	113
Tabel 5.6	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai Dengan Tujuan, Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	113
Tabel. T-C.28	Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2020.....	133
Tabel. T-C.29	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2020.....	134



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.....	38
Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupten Gowa.....	39
Grafik 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.	40
Grafik 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.....	41
Grafik 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.....	44
Grafik 2.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa	45
Grafik 2.8 Data Ketersediaan Energi Per Kapita Per Hari Tahun 2016 s.d 2020...	50
Grafik 2.11 Data Rata2 Harga GKP Tk. Penggilingan, GKG Beras Medium dan Beras Premium Tahun 2020.....	53



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa 4



LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Program dan Kegiatan Pendanaan Tahun Anggaran 2021-2026	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses peningkatan kualitas hidup masyarakat baik material maupun spritual. Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa merupakan bagian yang terpenting dari pembangunan perekonomian masyarakat karena mayoritas masyarakat kabupaten Gowa.

Untuk melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan diperlukan adanya sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, oleh karena itu pengembangan Ketahanan Pangan dan sumber daya manusia mutlak perlu dilaksanakan dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat dan SDM yang berkualitas.

Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub sistem Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan. Kinerja masing-masing subsistem tercermin dalam stabilitas pasokan pangan ,akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. aman untuk dikonsumsi. Kinerja dari ke empat subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita . Apabila salah satu atau lebih dari empat subsisten tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan. Ditetapkan dari tidak berfungsi makan akan terjadi masalah kerawanan pangan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategi



Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Komitmen kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.

Renstra Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah

dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistimatis untuk periode 5 (lima) tahun, Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa memuat tentang Visi, Misi,

Tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan, Indikasi program, dan kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

Sehingga untuk mencapai misi tersebut ditetapkan beberapa program yang menjadi urusan wajib pangan. Sementara arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMD 2021-2026 Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian dan Kedaulatan pangan dengan: (a) peningkatan produksi pangan pokok (b) stabilisasi harga bahan pangan (c) terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta (d) meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

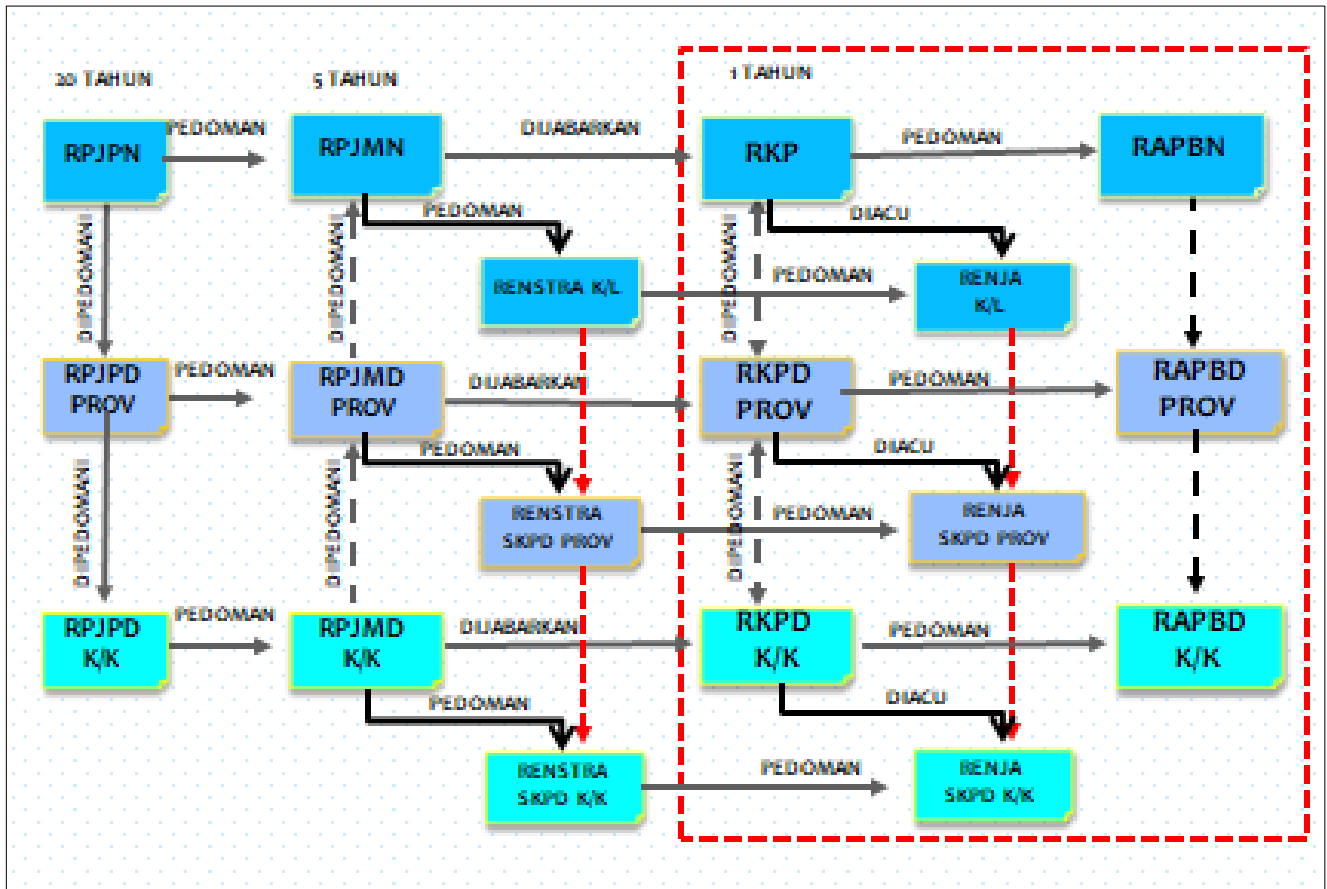
Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarah dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib membuat laporan pertanggung jawaban urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah



Dalam Penyusunan Perencanaan, urusan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib dalam bidang pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam menentukan stabilitas ekonomi, sosial dan politik di suatu wilayah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dituntut untuk bekerja lebih keras lagi dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Gowa tinggal di pedesaan dengan kondisi yang sangat beragam. Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, perlu disusun suatu perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih baik dengan memperhatikan berbagai aspek. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dapat diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan Ketahanan Pangan.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan
Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa. Dengan demikian Renstra merupakan penjabaran RPJMD

terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1.2 . Landasan Hukum



Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang, Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
9. Peraturan apemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;



18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
21. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Gerakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang



Pembentukan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Bupati Gowa Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;

29. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan

Pangan Kabupaten Gowa;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati Gowa Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun ke depan
2. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan dari tahun 2021 -2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2021 - 2026.
2. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pangan.
3. Menjamin adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan



4. Sebagai pedoman Kepala Daerah dalam mengevaluasi kinerja masing-masing Perangkat Daerah setiap akhir tahun;
5. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan strategis tahun 2021 – 2026, yang menjabarkan kebijaksanaan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi secara terpadu, dan bertahap, dengan mengutamakan kepentingan daerah sesuai situasi, kondisi, potensi dan kewenangan yang ada

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menjelaskan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Telaahan, visi, misi dan Program Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (KKD) terpilih, Telaahan Renstra K/L, dan Rencana Strategis (Renstra), Telaahan Rencana Tata



Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentu Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Indikator Kinerja tujuan serta target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat daerah tahun 2021 - 2026

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra

kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dasar Hukum dibentuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.

Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dari fungsi organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan visi



- dan misi serta kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memvalidasi program dan kegiatan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang-bidang, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - h. memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - i. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugasnya berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;



- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, dan Lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan ketahanan pangan;
- k. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian, hukum;.
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai rincian, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan unit pelaksana teknis berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretaris Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasinya agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretaris berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan dengan lancar;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi
- i. mengoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntabilitas, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- k. mengoordin menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;



- l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahahi 3 Sub Bagian, yaitu meliputi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan. Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana teknis berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan rencana dinas;
- c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas sub bagian guna tertib administrasi perkantoran
- g. mengikuti rapat sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penyusunan rencana strategi dinas, rencana kerja, dinas, penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- i. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- j. menghimpun, menyajikan dan melaporkan data dan informasi dinas berdasarkan hasil pemantauan untuk evaluasi kinerja dinas;
- k. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
- l. melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan



penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan (ASN) untuk pengembangan karir;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan ;
- g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan ;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup dinas sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas;



- i. melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas
- j. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi, hukum dan perundang-undangan, administrasi surat tugas, perjalanan dinas pegawai, tata upacara berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
- l. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindalanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas



- b. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan dinas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian keuangan berdasar kan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas sub bagian guna tertib administrasi perkantoran;
- g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- i. mengoodinasikan pelaksanaan akuntabilitas pengeluaran dan penerimaan keauang sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- k. menyusun realisasi perhitungan anggaran sesuai lketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- l. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai rincian, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, menyiapkan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, menyiapkan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;



- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, menyiapkan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, menyiapkan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, menyiapkan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, menyiapkan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- g. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- h. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- i. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi 2 seksi, meliputi :

1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan

Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan



Kerawanan Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. melakukan koordinasi Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- b. melakukan bahan analisis di seksi ketersediaan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. melakukan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan de seksi ketersediaan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan makanan (NBM);
- e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengdampingan di seksiketersediaan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervise dan pelaporan kegiatan di seksi ketersediaan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

2. Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai ttugas membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan



kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. melakukan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

4. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kepala bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai rincian, tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi dan cadangan pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang distribus pangan, pemantapan program, harga pangan, dan icadangan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - g. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - h. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - i. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi 2 seksi, meliputi :

1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Seksi Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi distribusi dan harga pangan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. melakukan koordinasi di bidang distribusin dan cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan, pasokan pangan, dan harga pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan pangan, dan harga pangan;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk pabel harga;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan, pasokan pangan dan cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan distribusi pangan, pasokan pangan dan harga pangan;cadangan pangan;



- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi cadangan pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

2. Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi cadangan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi cadangan pangan dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;



5. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai rincian, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;



- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- g. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- h. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan membawahi 2 seksi, meliputi :

1. Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Konsumsi dan panganekaragaman konsumsi pangan mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
- d. melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan perkapita per tahun dan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi panga;
- g. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar Lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam prcepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lolal;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan panganekaragaman pangan;
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

2. Seksi Pengembangan dan Promosi Pangan Lokal

Seksi Pengembangan dan Promosi Pangan Lokal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang promosi dan pengembangan pangan lokal;



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pengembangan dan promosi pangan lokal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi dan pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi; pangan non beras dan non terigu;
- f. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar Lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan pangan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi dan pengembangan pangan lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi dan pengembangan pangan lokal; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

6. Kepala Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan

Bidang Keamanan dan kelembagaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberi pendampingan serta pemantauan dan evaluasi bidang keamanan dan kelembagaan pangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang konsumsi dan penganekaragaman mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang keamanan dan kelembagaan pangan;



- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan dan kelembagaan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keamanan dan kelembagaan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang keamanan dan kelembagaan pangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang keamanan dan kelembagaan pangan, mempunyai rincian, tugas dan fungsi sebagai berikut:.

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang keamanan dan kelembagaan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang keamanan dan kelembagaan pangan, pengawasan keamanan pangan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan kelembagaan pangan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan dan kelembagaan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan ;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang keamanan dan kelembagaan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bidang keamanan dan kelembagaan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;



- h. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- i. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kepala Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan membawahi 2 seksi, meliputi :

1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan dan kelembagaan pengawasan keamanan pangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan
- d. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;



- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasn pangan segar yang beredar;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengujian laboratorium pangan segar;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

2. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi kerja sama dan informasi keamanan pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- e. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;



- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dengan tugasnya;



STRUKTUR ORGANISASI

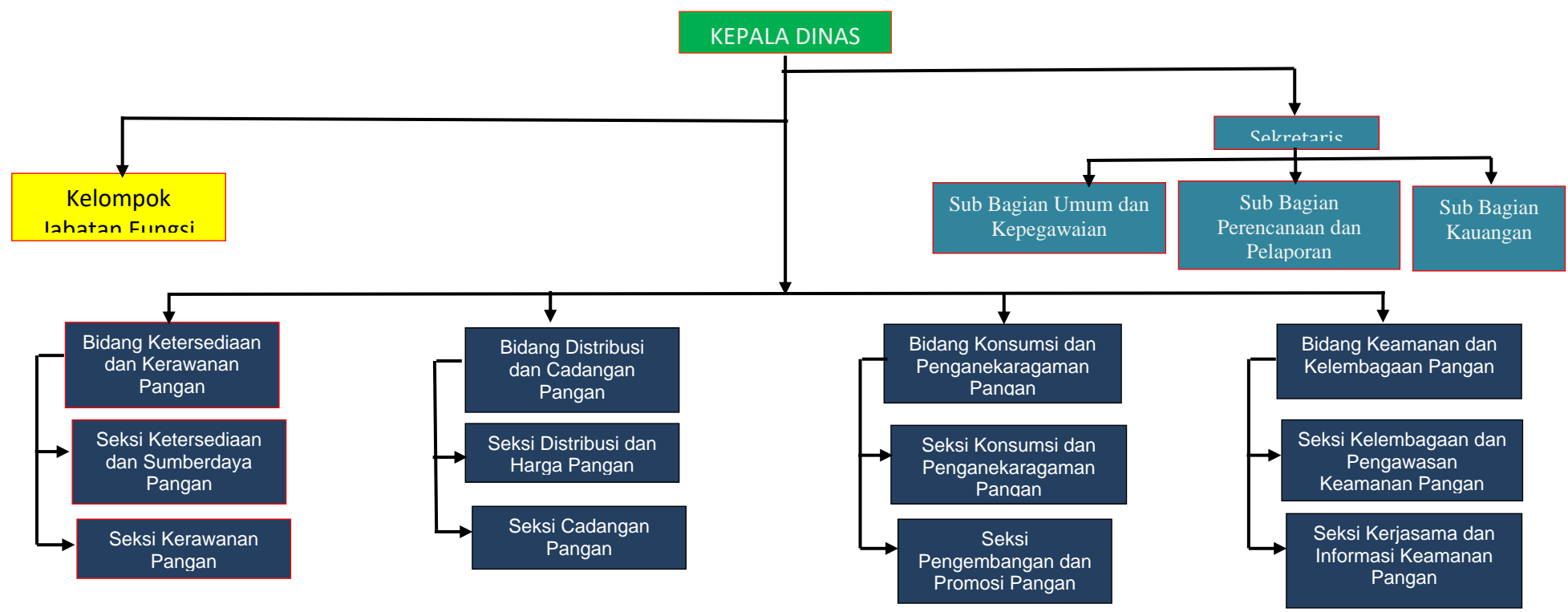
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Gowa mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - a. Seksi Ketersediaan dan Sumber daya Pangan
 - b. Seksi Kerawanan Pangan
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 - a. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
 - b. Seksi Cadangan Pangan
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Pengembangan dan Promosi Pangan Lokal
6. Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan Pangan
 - b. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan





2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

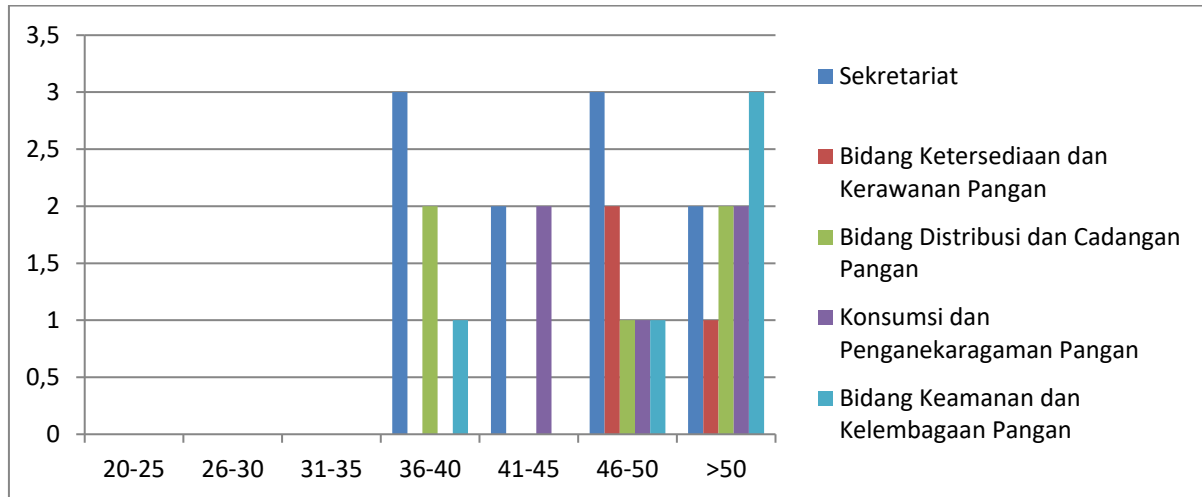
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa menurut Kelompok Umur berdasarkan data dari sub bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Desember tahun 2021 berjumlah 28 orang menurut kelompok umur:

Tabel. 2..1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten gowa

No	Uraian Kerja	Usia (Tahun)							
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat	0	0	0	3	2	3	2	10
2.	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	0	0	0	0	0	2	1	3
3	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	0	0	0	2	0	1	2	5
4	Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	0	0	0	0	2	1	2	5
5	Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan	0	0	0	1	0	1	3	5
	Total	0	0	0	6	4	8	10	28



Grafik : 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten gowa



Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Oktober Tahun 2021 berjumlah 28 orang. Menurut Kelompok umur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel diatas bahwa berdasarkan data yang ditampilkan Tabel . 2.2.1, dengan jenjang usia 46 - 50 keatas yang jumlah 18 orang atau 64 % dibanding dengan usia 45 tahun kebawah dengan jumlah 10 orang atau 36 % .

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Gowa

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	0	0	-	1	1
2.	Sekretariat	0	0	2	2	4
3.	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan	0	0	2	1	3
4.	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	0	0	2	1	3
5.	Bidang Konsumsi dan Pengankaragaman	0	0	2	1	3



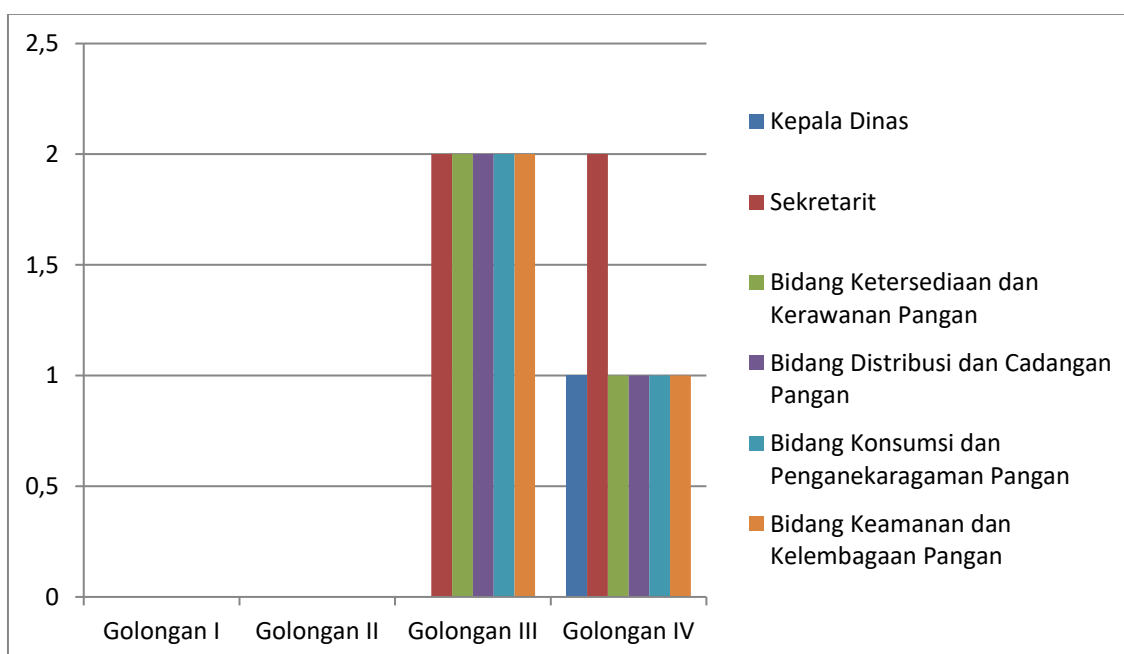
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

6.	Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan	0	0	2	1	3
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0
Total		0	0	10	7	17

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan

Grafik : 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa



Sekretariat memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak dari pada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Dinas Ketahanan Pangan. Susunan Kepagawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa pada Bulan Oktober Tahun 2021 berjumlah 28 orang terdiri dari laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang. Kondisi kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel. 2 dibawah ini :

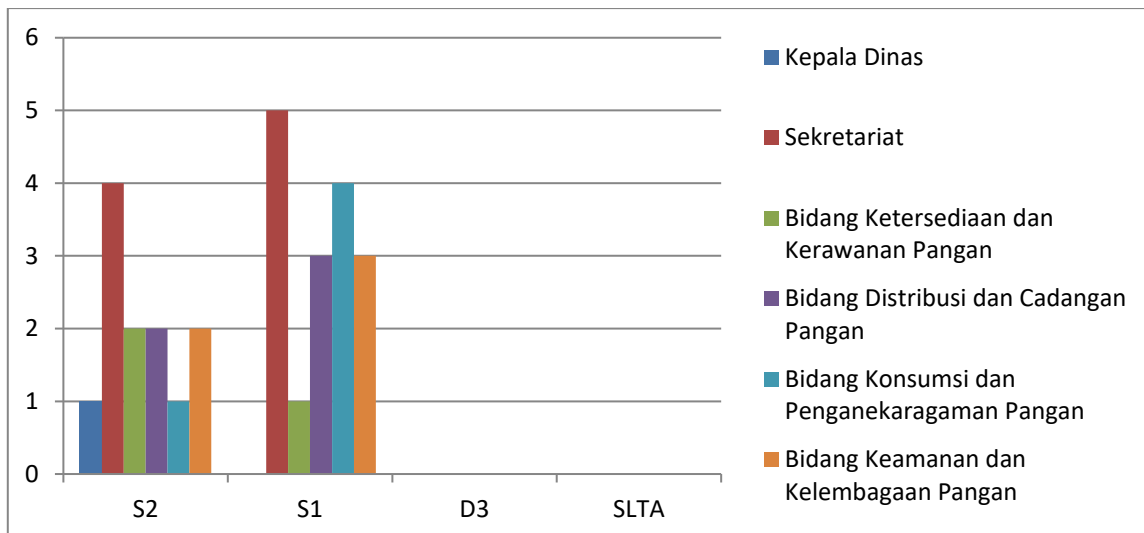


Tabel. 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

No	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	1
2	Sekretariat	4	5	0	0	9
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2	1	0	0	3
4	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	2	3	0	0	5
5	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	1	4	0	0	5
6	Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan	2	3	0	0	5
7	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0
Jumlah		12	16	0	0	28

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

Grafik : 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa



Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2.3, tingkat pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 16 orang 57,14%. Tingkat pendidikan bagian terbesar



dari Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa secara umum.

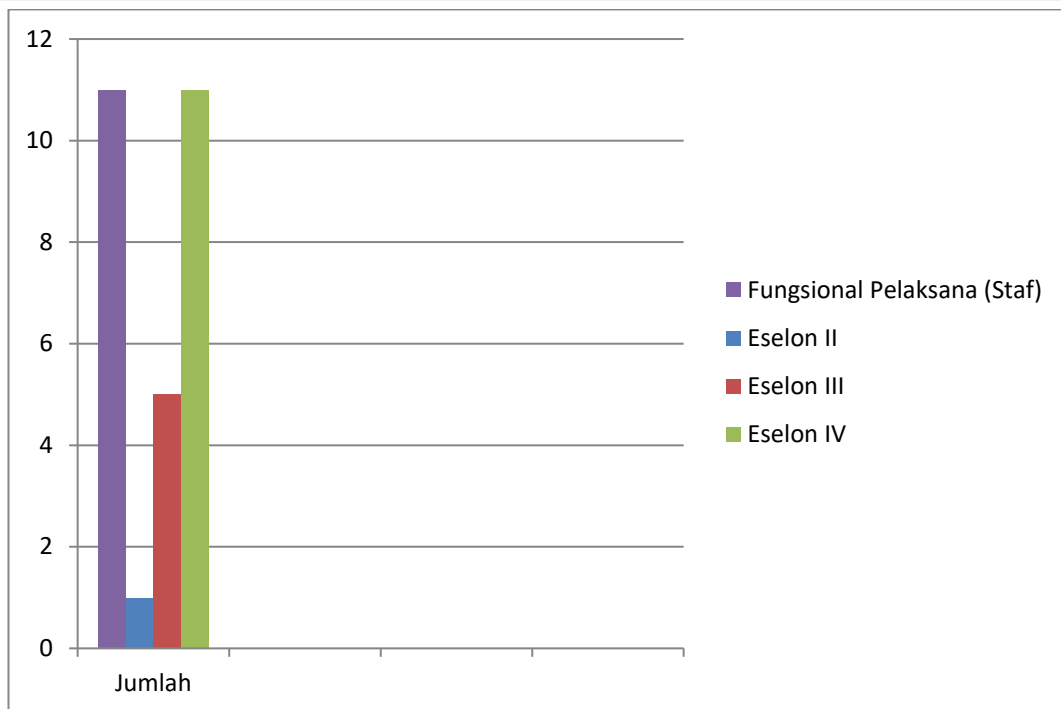
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yang menamatkan pendidikan S2 tercatat ada 12 orang, S1 tercatat sebanyak 16 orang persentase, jumlah tersebut mencapai 42,86 % dari seluruh Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Ketahanan Pangan Kab Gowa adalah kurangnya petugas perencana, analisis kebijakan, dan analisis mutu gizi pangan dan mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Daerah telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, tetapi belum menarik minat pegawai lainnya untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Tabel . 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Dinas Ketahanan pangan
Kabupaten Gowa

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	11
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan terampil)	0
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	11
	Jumlah	28

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

Grafik : 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Dinas Ketahanan pangan
Kabupaten Gowa



Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai menurut peta jabatan dinas ketahanan pangan sebanyak 28 orang yang paling tinggi menduduki jabatan eselon IV 11 (sebelas) orang, dan yang menduduki jabatan fungsional pelaksana 11 (sebelas) orang,

Pangan Kabupaten Gowa, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya petugas perencana, analis kebijakan, petugas fungsional penyuluh ketahanan pangan, analis kesehatan masyarakat, analis mutu gizi pangan, petugas statistik dan instruktur pelatihan keamanan pangan.

Sarana prasarana yang dimiliki Kantor Ketahanan Pangan sebagai berikut:



Tabel. 2.5
Susunan Kepegawaian yang telah mengikuti Diklat

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TEMPAT DIKLAT	Ket
1.	H.Syamhari Rasyid,S.Ag, SH NIP. 10770917 200312 1 001	Pembina Utama Muda /IV/c	Kepala Dinas	Propensi i	PIM III
2.	Ir. Rahma Sari Maming,M.Si Nip. 19670512 199102 2 013	Pembina Tk.I/IV/b	Sekretaris Dinas	Pemda Gowa	PIM III
3.	Hj.Megawati aso,SKM,M.Si,M.Kes Nip. 19641025 198701 2 001	Pembina IV/a	Kabid	Pemda Gowa	PIM III
4.	Abu Harum, S.Pt,M. Adm, Pemb Nip. 19691222 199003 2 003	Pembina IV/a	Kabid	Pemda Gowa	PIM IV
5.	Muhammad Ramli, S.Pi, MM Nip. 19690609 199003 1 001	Pembina IV/a	Kabid	Pemda Gowa	PIM IV
6.	Ir.Abdul Halim,MP Nip. 19661008 199503 1 002	Penata Tk I/III/d	Kabid	Pemda Gowa	PIM IV
7.	Syamsinar, SP,M.SI NIP. 19650311 199703 2 001	Pembina IV/a	Kepala Seksi	Pemda Gowa	PIM IV
8.	St. Salma, STP NIP. 19640623 198803 2 005	Penata Tk.I/III/d	Kepala Seksi	Pemda Gowa	PIM IV
9.	Muhammad Ahkam Mahsus NIP. 19701217 200701 1 013	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Seksi	Pemda Gowa	Pim IV

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa memerlukan pegawai dengan kompetensi tertentu, yaitu : perencana, analis kebijakan, analis kesehatan masyarakat dan analis mutu gizi pangan dan statistik. Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas Ketahanan sebagai berikut:

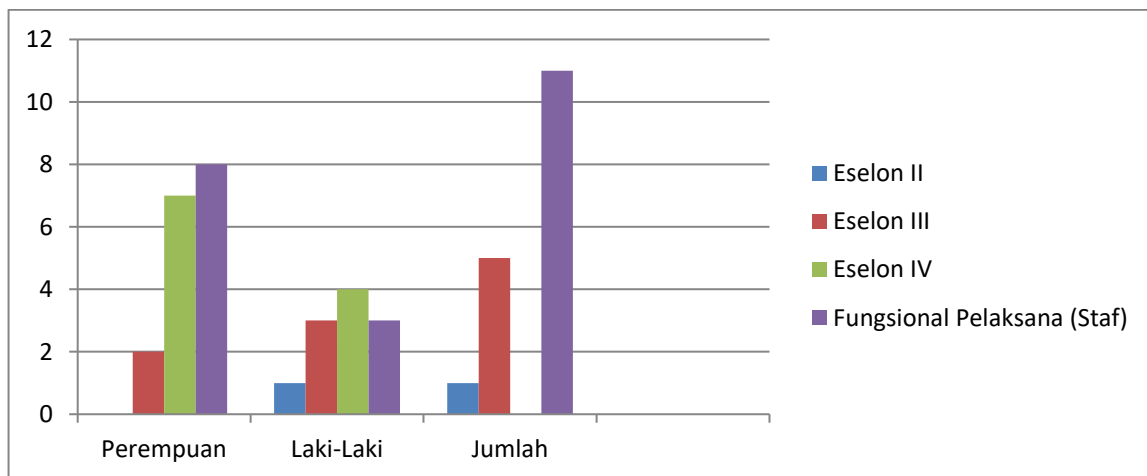


Tabel. 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis kelamin dan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	2	3	5
3.	Eselon IV	7	4	11
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan terampil)	0	0	0
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	8	3	11
Jumlah		17	11	28

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

Grafik : 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis kelamin dan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa



Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan Dinas Ketahanan Pangan sekretariat memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak dari pada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Dinas Ketahanan Pangan. Susunan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa pada Bulan Oktober Tahun 2021 berjumlah 28 orang terdiri dari laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang. Kondisi



kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel. 2 dibawah ini :

Tabel . 2.7

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan Mesin	146	5	611	762
3	Gedung Bangunan	7	0	0	7
4	Jalan Irigasi jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0
7	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Total		153	5	611	769

Sumber data dari sub bagian umum dan Kepegawaian (bendahara asset) Dinas Ketahanan Pangan

Grafik : 2.7

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa



Dari jumlah sarana dan prasarana (aset) Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Gowa yang dimiliki dari Jenis aset dan status aset total 769 yang terdiri dari jenis aset Peralatan Mesin yang baik sejumlah 146, sedang 5 dan rusak berat 611 sedangkan jenis aset gedung bangunan yang baik 7, persentase jenis aset yang dimiliki Dinas



Ketahanan Pangan masuk kategori baik yaitu 19,90 %, sedang 0,70 dan yang rusak berat 79,45%.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa merupakan salah satu dinas yang mulai berdiri pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 52 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah; sebelumnya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, sehingga tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah target pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari tahun sebelumnya dan setelah berdirinya dinas ketahanan pangan sebagai berikut: Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa menunjukkan keberhasilan pencapaian. Ada dua indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Ketersediaan Pangan Utama (beras) dan Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH), IKU ini ada beberapa pendukung indikator kinerja yaitu : 1. Distribusi Pangan Secara Merata, 2. Stabilitasnya Harga Pangan (beras) tingkat konsumen, 3. Stabilitasnya Harga Pangan (gabah) tingkat produsen, 4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, 5. Informasi Ketahanan Pangan yang Up to date, 6. Konsumsi Beras Perkapita Pertahun, 7. Ketersediaan Pangan Alternatif, 8. Menurunnya Daerah Rawan Pangan, 9. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar, 10. Pengujian Keamanan Pangan Segar dari Cemaran Biologis, Kimia dan Fisika

Pada indikator kinerja prosentase Lumbung pangan masyarakat dengan Cadangan pangan pemerintah pencapaian mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Cadangan pangan disini yang diukur hanya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dari stok cadangan pangan di gudang lumbung pangan kabupaten Gowa. Realisasi sampai dengan tahun 2020 masih lebih tinggi. Hal ini disebabkan stok cadangan pangan yang tersedia di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dengan stok 9.010 kg dan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten stok di Gudang 2 ton tidak memenuhi standar yang ditetapkan yaitu minimal 100 ton karena keterbatasan kemampuan anggaran dan ada pengurangan stok cadangan pangan pemerintah setiap tahunnya yang digunakan untuk bantuan kepada daerah yang terkena bencana alam, puso, rawan pangan serta masalah lainnya. Untuk



mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut pemerintah daerah perlu menambah stok cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gowa.

Indikator Ketersediaan Pangan Utama realisasi yang diperoleh sudah melebihi target, prosentase Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) telah sesuai target yang ditetapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Hal ini yang perlu terus dilakukan adalah dengan memantau dan meningkatkan stabilisasi harga dan pasokan pangan.

Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH), realisasi kinerja setiap tahun telah melebihi target dan mengalami peningkatan target, yang ideal Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat ideal yang ditunjukkan oleh konsumsi dengan ada kegiatan P2L untuk kelompok pangan sayur dan buah serta umbi-umbian kacang-kacangan, lemak/minyak, gula dan kelebihan konsumsi untuk kelompok pangan padi-padian. Antar daerah agroekologi mempunyai kesamaan pola keragaman konsumsi kelompok pangan. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar untuk Kabupaten Gowa ada semua tipe agroekologi adalah padi-padian. Pola sumbangan energi dari kelompok pangan untuk Kabupaten Gowa dan semua agroekologi adalah padi-padian > minyak dan lemak > kacang-kacangan > pangan hewani > sayuran dan buah > gula > kelompok pangan lainnya = buah dan biji berlemak > umbi-umbian. Skor PPH untuk Kabupaten Gowa tahun 2016 adalah (target realisasi 99,99%), tahun 2017 (target realisasi 100,09), tahun 2018 (target realisasi 100,22), tahun 2019 (target 100,29) dan tahun 2020 (target 100,40) jika dibandingkan dengan skor PPH ideal yaitu sebesar 100% maka skor PPH Kabupaten Gowa mencapai skor PPH yang ideal.

Secara umum, konsumsi kelompok pangan yang berlebih untuk seluruh daerah agroekologi adalah padi-padian. Kelompok pangan hewani mempunyai tingkat konsumsi yang hampir ideal. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi adalah umbi-umbian, lemak dan minyak, buah/biji berminyak, sayur dan buah, kacang-kacangan, dan gula. Pola konsumsi kelompok pangan antar tipe agroekologi di Kabupaten Gowa hampir sama. Dengan demikian pengembangan pangan wilayah antar daerah agroekologi di



Kabupaten Gowa dapat diseragamkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari (KRPL) atau Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber pangan lokal sehingga pola pangan masyarakat lebih beragam dan tidak tergantung pada beras.

Indikator Kinerja Pegawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan capaian kinerja setiap tahunnya mencapai 100% berdasarkan target Renstra sampai dengan Tahun 2020 sudah melebihi target untuk pengambilan sampel dari 2016 sebanyak 5 jenis sampel persentase pangan aman (60%), tahun 2017 sebanyak 5 jenis sampel persentase pangan aman (60%), tahun 2018 sebanyak 20 jenis sampel persentase pangan aman (100%), tahun 2019 sebanyak 8 jenis sampel persentase pangan aman (88%) dan 2020 sebanyak 8 jenis sampel persentase pangan aman (100%) dan sudah dilaksanakan uji laboratorium yang aman dikonsumsi, sehingga rasio realisasi capaian kinerja sebesar 81,6% Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Penangan Daerah Rawan Pangan, capaian kinerja setiap tahunnya adalah 100% dari target Renstra

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa No. 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa. dengan terkait bidang ketahanan pangan terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 3. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 4. Keamanan dan Kelembagaan

Pangan, guna adanya pembagian tugas yang menjadi tanggungjawab capaian kinerja dari masing-masing bidang maka perlu penambahan/perubahan program yaitu semula 2 (dua) Program yaitu : Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Diversifikasi (permendagri 13 tahun 2012) untuk permendagri 90 tahun 2019 ada 4 Program yaitu : 1. Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat, 3. Program Penanganan Kerawanan pangan dan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Maka untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa perlu melakukan upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan melalui beberapa kegiatan strategis baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (bersentuhan dengan



masyarakat) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta analisis-analisis dalam rangka menghasilkan rumusan-rumusan dan kebijakan peningkatan ketahanan pangan baik dalam bentuk himbauan, edaran, keputusan dan peraturan.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan Ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa mengemban tugas Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang ketahanan pangan.

Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : produksi dalam negeri, pemasokan pangan, pengelolaan cadangan pangan.

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu(kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana social (transien). Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dilakukan penanganan yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada, salah satunya dengan konsep Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yaitu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
2. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat
3. Penyusunan peta kerawanan pangan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)



Tabel : 2.8

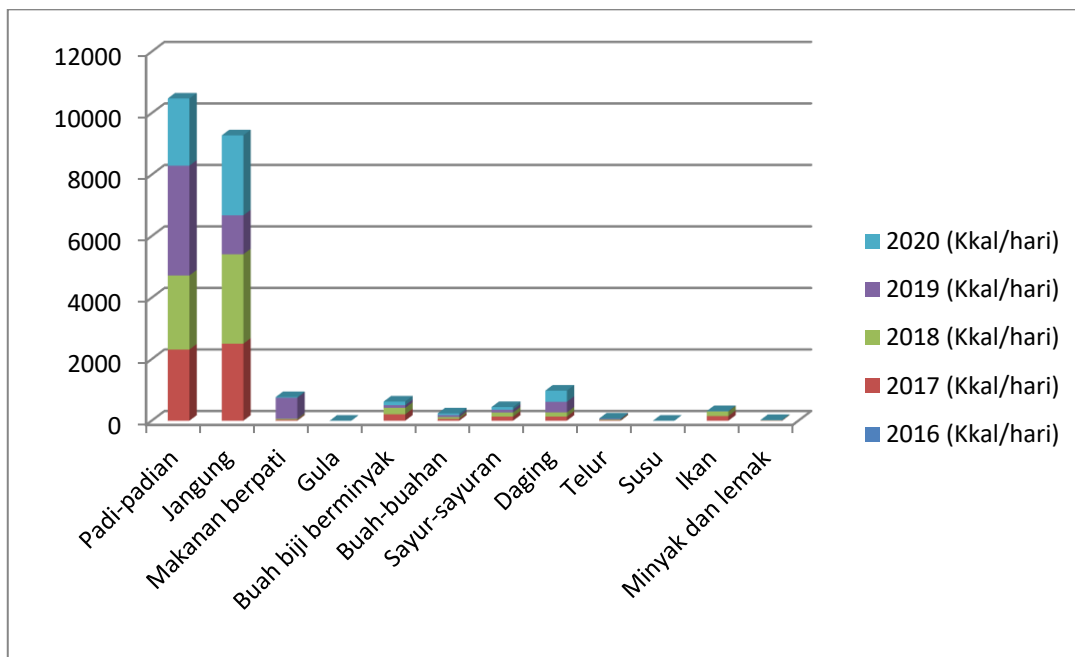
Data Ketersediaan Energi Per Kapita Per Hari Tahun 2016 s.d 2020

No	Jenis Bahan Makanan	2016 (Kkal/hari)	2017 (Kkal/hari)	2018 (Kkal/hari)	2019 (Kkal/hari)	2020 (Kkal/hari)
1.	Padi-padian	-	2.312	2.412	3.567	2.187
2.	Jagung	-	2.504	2.908	1.266	2.601
2.	Makanan berpati	-	30	31	685	23
3.	Gula	-	-	-	-	-
4.	Buah biji berminyak	-	209	209	87	119
5.	Buah-buahan	-	59	59	63	56
6.	Sayur-sayuran	-	134	134	89	87
7.	Daging	-	135	135	344	365
8.	Telur	-	19	19	24	8
9.	Susu	-	-	-	-	-
10.	Ikan	-	151	151	6	4
11	Minyak dan lemak	-	8	8	1	8
	Total	-	5.561	6.066	6.132	5.458

Sumber data : Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2016 s.d 2020 Dinas Ketahanan Pangan

Grafik : 2.8

Data Ketersediaan Energi Per Kapita Per Hari Tahun 2016 s.d 2020





Penguatan Cadangan Pangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan oleh SKPD yang bersangkutan, sedangkan penguatan cadangan pangan pada empat tahun terakhir adalah sebesar 2 ton. penguatan cadangan pangan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 2.9

Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa, Tahun 2021

Tahun	Jumlah Cadangan Pangan (Lumbung Pangan Masyarakat)	Penguatan Cadangan Pangan (di Lumbung Pangan Masyarakat)
2016	-	-
2017	2	2 Ton
2018	2	2 Ton
2019	2	2 Ton
2020	2	2 Ton

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga. Hasil Analisis Sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang menghasilkan peta situasi pangan dan gizi di tingkat wilayah kecamatan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel : 2.10
Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan Daerah RawanPanga	Kecamatan	1	1	2	2	3

Sumber : Ketahanan Pangan Kab. Gowa, Tahun 2021

Distribusi Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan system distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlahpun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, dan indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

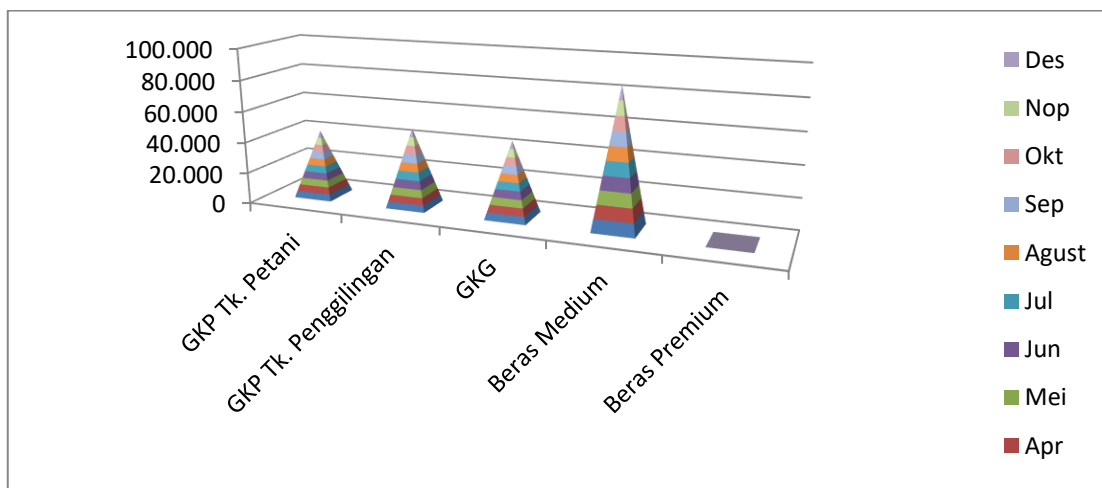
1. Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan dan Informasi Harga Pangan
2. Cadangan Pangan Pemerintah
3. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko tani Indonesia (TTI)



Tabel : 2.11
Data Rata-Rata Harga GKP Tk Petani GKP Tk. Penggilingan, GKG Beras Madium dan Beras Premium Tahun 2020

No	Uraian	Harga Gabah/Beras (Rp/Kg)									
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus t	Sep	Okt	Nop	Des
1	GKP Tk. Petani	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
2	GKP Tk. Penggilingan	4.300	4.300	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
3	GKG	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
4	Beras Medium	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800
5	Beras Premium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junlah	5.425	5.425	5.550	5.750	5.759	5.759	5.795	5.850	5.850	5.850

Grafik : 2.11
Data Rata2 Harga GKP Tk Petani GKP Tk. Penggilingan, GKG Beras Madium dan Beras Premium Tahun 2020



Konsumsi Pangan

Pola Konsumsi Pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan Kabupaten Gowa, keanekaragaman, kandungan gizi,



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

keamanan dan kehalalan. Juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan pada tubuh (foot utility) dapat optimal dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energy, protein, vitamin dan mineral serta aman. Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
2. Lomba Cipta Menu Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal

Tabel : 2.12

Perkembangan Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

N O	Jenis Pangan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Kalori	%	Kalori	%	Kalori	%	Kalori	%	Kalori	%
1	Padi-padian	980,1	53,5	980,1	53,5	977,1	53,8	920,7	51,8	969,5	52,4
2	Umbi-umbian	30,8	1,7	30,8	1,7	54,0	3,0	64,4	3,6	69,8	3,8
3	Pangan Hewani	211,9	11,6	211,9	11,6	215,8	11,9	221,2	12,4	231,4	12,5
4	Minyak dan Lemak	225,0	12,3	225,0	12,3	223,9	12,3	225,8	12,7	224,2	12,1
5	Bua/biji lemak	48,1	2,6	48,1	2,6	36,5	2,0	34,6	1,9	35,2	1,9
6	Kacang-kacangan	59,3	3,2	60,5	3,3	53,4	2,9	61,0	3,4	65,4	3,5
7	Gula	44,8	2,4	44,8	2,4	44,3	2,4	44,2	2,5	44,9	2,4
8	Sayur dan buah	187,9	10,3	188,2	10,3	170,5	9,4	158,4	8,9	161,1	8,7
9	Lain-lain	44,2	2,4	44,2	2,4	42,2	2,3	46,8	2,6	48,1	2,6
	Total	1832,0	100,0	1833,6	100,0	1817,6	100,0	1777,2	100,0	1849,7	100,0
	Skor PPH	89,5		89,6		89,7		89,8		89,9	

PERKEMBANGAN PERSENTASE ANGKA KONSUMSI ENERGI, DAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN PENDUDUK KABUPATEN GOWA MENURUT KELOMPOK BAHAN PANGAN DAN NILAI TOTALNYA TAHUN 2016-2020

N O	Jenis Pangan	2016		2017		2018		2019		2020	
		% AKE	PPH	% AKE	PPH	% AKE	PPH	% AKE	PPH	% AKE	PPH
1	Padi-padian	49,0	24,5	49,0	24,5	48,9	24,4	46,0	23,0	46,2	23,1
2	Umbi-umbian	1,5	0,8	1,5	0,8	2,7	1,3	3,2	1,6	3,3	1,7



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

3	Pangan Hewani	10,6	21,2	10,6	21,2	10,8	21,6	11,1	22,1	11,0	22,0
4	Minyak dan Lemak	11,2	5,0	11,2	5,0	11,2	5,0	11,3	5,0	10,7	5,0
5	Bua/biji lemak	2,4	1,0	2,4	1,0	1,8	0,9	1,7	0,9	1,7	0,8
6	Kacang-kacangan	3,0	5,9	3,0	6,1	2,7	5,3	3,1	6,1	3,1	6,2
7	Gula	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1	2,1	1,1
8	Sayur dan buah	9,4	30,0	9,4	30,0	8,5	30,0	7,9	30,0	7,7	30,0
9	Lain-lain	2,2	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
	Total	91,6	89,5	91,7	89,6	90,9	89,7	88,9	89,8	88,1	89,9

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : 2.13

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,5%	89,6%	89,7%	89,8%	89,9%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa, Tahun 2021

Keamanan Pangan

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian integral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat dipisahkan dan penting



dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia, maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat.

Pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama.

Tabel : 2.14
Hasil Pengujian Sampel Pangan Berdasarkan Uji Laboratorium
Keamanan Pangan Tahun 2016 - 2020

PERSENTASE PANGAN AMAN BERDASARKAN UJI LABORATORIUM			
KEAMANAN PANGAN			
Tahun	Sampel Pangan yang Aman	Jumlah Sampel Yang Di Uji	Persentase Pangan Aman
	Jumlah Total sampel Pangan		
2016	3/5	Mentimun, Bawang daun, Semangka, Melon, dan Bawang	60%
2017	3/5	Sawi, Semangka, Pare', Terong dan Ppaya	60%
2018	20/20	Mie basah, Ayam Potong, Cincau, Kerupuk, Semangka, Tempe, Tahu, Ikan Segar, Cabe Merah Besar, Cendol Warnah Merah, Mangga, Melon, Alpukat, Jeruk, Langsung, Tahu Warna Kuning, Kerupuk Warna Kuning, Kerupuk Warnah Merah, Sagu Mutiaran Merah, dan Kolang Kaling Merah	100%
2019	7/8	1 (Bayam)	88%
2020	8/8	5 (Anggur, Wortel)	100%
*Pangan Aman =	$\frac{A'}{B} \times 100\% = \frac{3}{5} \times 100\%$		



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

	A = Jumlah Sampel yang Aman		
	B = Jumlah Total yang di Uji		

*Pangan Aman = $A/B \times 100\% = 3/(5) \times 100\%$

A = Jumlah Sampel yang aman

B = Jumlah Total yang diuji



Tabel 2.15
Capaian Target Indikator SDGs/TPB Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Gowa

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan									
2.1.1	Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan (prevalance oundernnorishment)	Menurun	10%	5%	5%	5%	5%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2	Penanganan daerah rawan pangan	Menurun	30%	25%	20%	15%	15%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minumum dibawah 1400 kkl/kapita/hari	Menurun	NA	NA	92,95%	86,38%	86,38%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
2.2.2	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita		40,10%	36,80%	44,50%	36,90%	36,90%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan



Tabel : 2.16
Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketersediaan Pangan Utama (beras)				148.886	153.886	158.886	163.886	168.886	225.000	250.000	314,556	244,997	262.033	151,12	162,45	197,97	149,49	155,15
2	Distribusi Pangan Secara Merata				84	86	88	90	92	85	86	90	92	92	101,19	100	102,27	102,22	100
3	Stabilnya harga pangan (gabah) tingkat produsen				Sesuai HPP (Rp.3.750)	Sesuai HPP (Rp.3.750)	Sesuai HPP (Rp.3.750)	Sesuai HPP (Rp.4.070)	Sesuai HPP (Rp.4.070)	Sesuai HPP (Rp.4.000)	Sesuai HPP (Rp.4.200)	Sesuai HPP (Rp.4.200)	Sesuai HPP (Rp.4.200)	Sesuai HPP (Rp.4.400)	107	112	112	106	108
4	Stabilnya harga pangan (beras) tingkat konsumen				cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	5,33 cv ≤ 5%	3,03 cv ≤ 5%	4,42 cv ≤ 5%	3,00 cv ≤ 5%	1,13 cv ≤ 5%	93,8	165,01	111,54	139	117
5	Cadangan pangan pemerintah daerah				10	10	10	10	10	2	2	1.882 kg	10	1	20	20	18,82	100	10
6	Informasi Ketahanan Pangan yang				86	88	90	92	94	86	88	90	92	94	100	100	100	100	100



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

	Lengkap, Akurat dan Up to Date																		
7	Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)				89,51	89,52	89,53	89,54	89,55	89,51	89,6	89,7	89,8	89,9	100	100,09	100,19	100,29	100,4
8.	Konsumsi beras per kapita per tahun				96,7	96,6	96,4	96,2	96,1	98,7	98,7	89,6	83,1	87,9	102,07	102,17	92,95	91,46	91,47
9	Ketersediaan pangan alternatif				60	65	70	75	80	60	65	92	82,5	88	100	100	131,42	110	110
10	Menurunya Daerah Rawan Pangan				1	1	2	2	3	1	1	2	2	3	100	100	100	100	100
11.	Pengawasan dan pembinaan Keamanan pangan segar				3	3	4	4	4	4	3	4	4	6	100	100	100	100	150
12.	Pengujian keamanan pangan segar cemaran biologis, kimia dan fisik				6	6	7	7	8	7	6	7	8	8	11,67	100	100	114,28	100



Tabel. 2.17

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Total Belanja	3.143.209.839,15	3.047.029.546	3.301.573.290,50	4.140.262.884,46	3.052.059.140,38	3.034.444.224,-	2.922.23.876	315.9757.296	4.016.227.327,00	2.854.611.123,00	96,54	95,90	97,70	97,00	97,00	3.336.826.940,08	3.996.318,5
Belanja Tidak Langsung	1.665.538.413,15	2.217.080.046	2.715.228.290,50	2.732.591.532,46	122.229.964,22	1.582.782.638	2.102.921.658	2.576.303.605	2.677.306.377,00	2.442.599.343,00	95,03	94,85	94,88	97,98	95,57	1.890.533.669,26	3.996.830.711,5
Belanja Pegawai	1.665.538.413,15	2.217.080.046	2.715.228.290,50	2.677.306.377,00	122.229.964,22	1.582.782.638	2.102.921.658	2.576.303.605	2.677.306.377,00	2.442.599.343,00	95,03	94,85	94,88	97,98	95,57	1.890.533.669,26	2.242.978.405,25
Belanja Langsung	1.491.386.426,00	754.649.500	62.429.000	0	1.500.000.000	1.491.386.426,00	754.649.500	62.429.000	0	1.500.000.000	100	100	100	0	100	563.444.706,5	577.491.231,5
Belanja Pegawai	53.450.000	754.649.500	62.429.000	0	1.500.000.000	53.450.000	754.649.500	257.6303.605	0	2.442.599.343,00	100	98,59	100	0	100	206.969.350	843.816.205,75
Belanja Barang dan Jasa	448.181.426	744.011.218	520.916.000,00	589.847.570,00	453.316.000,00	434.273.086	744.011.218	520.795.191	589.847.570,00	412.011.780,00	96,90	98,59	99,98	100	90,85	691.727.624	675.234.711,25
Belanja Modal	1.029.490.000	75.300.000	3.000.000,00	18.248.800,00	22.000.000,00	1.017.388.500	75.300.000	3.000.000	18.248.800,00	22.000.000,00	98,82	100	100	100	100	456.509.775	283.984.400
Belanja Hibah	0	0	0	500.000.000	1.000.000.000	0	0	0	500.000.000	1.000.000.000	0	0	0	100	100	75.000.000	75.000.000



Tabel. 2.18
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahunan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan Pangan Utama	148.886	153.886	158,886	163.886	168.886	314,558	244,997	262.033	244,997	262.033
2.	Distribusi Pangan Secara Merata	84	86	88	90	92	83	86	95	95	95
3.	Stabilnya harga pangan (gabah) tingkat produsen	Sesuai HPP Rp.3.750	Sesuai HPP Rp.3.750.	Sesuai HPP Rp3.700	Sesuai HPP Rp. 3.700	Sesuai HPP Rp.3.700	Rp. 4.300	Rp. 4.200	RP.4.200	Rp. 4.200	Rp 4.400
4.	Stabilnya harga pangan (beras) tingkat konsumen	2.23cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	2.23 cv ≤ 5%	0,65 cv ≤ 5%	0,7cv ≤ 5%	3,00cv ≤ 5%	1,13cv ≤ 5%
5.	Cadangan pangan pemerintah daerah	10	10	10	10	10	2	2	1.882 (kg)	10	1
6.	Informasi Ketahanan Pangan yang Lengkap, Akurat dan Up to Date	86	88	90	92	94	86	88	90	92	94
7.	Mutu konsumsi pangan Pola Pangan Harapan (PPH)	89,51	89,52	89,53	89,54	89,55	89,51	89,60	89,73	89,8	89,9
8.	Konsumsi beras per kapita per tahun	96,7	96,6	96,4	96,2	96,1	96,8	98,7	89,6	83,1	87,9
9.	Ketersediaan pangan alternatif	60	65	70	75	80	58	65	92		82
10.	Menurnnya Daerah Rawan Pangan	1	1	2	2	3	1	1	2	2	3
11.	Pengawasan dan pembinaan pangan segar	3	3	4	4	4	3	3	5	4	4
12.	Uji Lab. keamanan pangan segar cemaran biologis, kimia dan fisik	6	6	7	7	8	5	6	7	8	8



Tabel : 2.19
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	214.337.826	263.346.50 0	191.199.300, -	337.809.900	254.160.30 0	200.429.486	252.708.218	178.378.491	337.807.90 0,00 00	248.139.030
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	127.430.000	157.125.00 0	22.840.000,-	48.179.600	21.618.950	127.430.000	157.125.000	22.840.000	47.678.400,0 0.	27.959.500
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.600.00,-	21.150.000	53.600.000	44.500.000	0	19.600.00,-	21.159.000	53.600.00,	44.500.00,00	21.618.000
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.702.300	46.094.000	19.075.700	33.204.500	27.984.500	10.702.300	46.094.000	19.075.700	33.194.500,0 0	27.959.500
6.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.114.051.30 0	198.792.00 0	119.482.500	708.504.500, 00	54.413.750	1.101.949.80 0	198.792.000	119.482.500	708.504.500	54.413.750
7.	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	0	200.270.00 0	190.147.500	281.433.500, 00	118.638.50 0	0	200.270.000	190.080.000	281.433.500	118.638.500



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di kabupaten Gowa Perlu dilakukan kajian atas situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud di masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di kabupaten Gowa antara lain :

1. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras, sementara umbi-umbian dan sumber karbohidrat yang lain hanya dijadikan sebagai makanan tambahan.
 2. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan masyarakat/kelompok wanita dalam mengangkat citra pangan lokal untuk memiliki potensi tawaran (nilai jual).
 3. Tidak adanya Regulasi di tingkat daerah/kabupaten yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan ketahanan pangan khusus pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga secara menyeluruh dan kontinyu di Tk. Desa/Kelurahan.
 4. Tidak adanya regulasi di Tk. Kabupaten yang memberi kewenangan kepada Dinas Ketahanan Pangan beserta SKPD terkait, dalam melakukan tindakan/sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian bahan tambahan makanan yang berlebihan/tdk direkomendit.
 5. Masih terdapatnya sejumlah rumah tangga yang terindikasi rawan pangan pada desa/kelurahan tertentu yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
 6. Adanya kecenderungan masyarakat makan makanan cepat saji.
 7. Tidak adanya penyuluh/pendamping khusus ketahanan pangan dalam menjalankan setiap program untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat.
 8. Masih adanya peredaran pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat.
- Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan kabupaten Gowa adalah :

1. Kabupaten Gowa wilayah yang terdekat dengan makassar / ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bisa menjadi daerah penyanggah kebutuhan pangan bagi kota makassar.



2. Iklim sangat mendukung dilakukannya penanaman Indeks Pertanaman (IP) tiga kali (3x)
3. Terjadi sinergitas program lintas sektor memberi peluang yang luas untuk dilaksanakan kegiatan secara terpadu
4. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi wilayah di bidang pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan.
5. Peran pemerintah yang konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan pemasaran dan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

2.4.1 Hasil Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten /Kota (Provinsi)

Analisis terhadap renstra badan ketahanan pangan kementerian pertanian (2020– 2024) dan Dinas Ketahanan Pangan provinsi Sulawesi Selatan (2018 – 2023) ditunjukkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra dinas ketahanan pangan kabupaten Gowa.

Hasil review ini akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan dinas ketahanan pangan yang akan ditangani pada renstra dinas ketahanan pangan kabupaten Gowa. Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel : 2.20

Komparasi Capaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa terhadap Sasaran Renstra K/L Badan Ketahanan Pangan Kementerian dan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa	Sasaran pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung)	Rata-rata 155.306 ton/tahun	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2	Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	Rata-rata 89,71/Kkal/kapita/hari		Terjaminnya keamanan pangan dan mutu konsumsi pangan strategis nasional

NB = 1. Capaian sasaran renstra - 2016 = 151,12
 - 2017 = 162,45
 - 2018 = 197,97
 - 2019 = 149,49
 - 2020 = 115,5

Rata-rata = 155.306 ton/tahun

2. Capaian sasaran renstra - 2016 = 89,51
 - 2017 = 89,60
 - 2018 = 89,97
 - 2019 = 89,8
 - 2020 = 89,9

rata-rata = 89,71 kkal/kapita/hari



2.4.2 Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa selama kurung waktu 2021-2026 adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ditandai dengan semakin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Wujud lain pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ditandai dengan semakin terjaganya ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; semakin tersedianya infrastruktur desa, semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter daerah (regional branded); semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin optimalnya program pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah; dan semakin menurunnya kasus-kasus sengketa atau konflik-konflik masalah pertanahan.

Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Gowa bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Hasil analisis yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan arah dalam pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun hasil analisis terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel : 2.21
Hasil Telaahan Struktur Ruang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur RuangSaat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
1	2	3	4	5	6
1	Alih Fungsi lahan	Terjadi alih fungsi lahan pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Berkurangnya luas lahan sawah dan yang produktif berakibatkan menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) atau Pengembangan Pangan Lestari (P2L) 2. Pengembangan kelompok masyarakat mandiri pangan dengan pemanfaatan lahan yang tidak terlalu luas 3. Pengembangan rumah tangga pengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

2.4.3 Hasil Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas Ketahanan Pangan Gowa. Dari hasil analisis yang diperoleh, sedangkan yang menjadi faktor pendorong dalam kaitannya dengan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan adalah adanya kepastian tata ruang memudahkan SKPD dalam mengalokasikan kegiatan. Metoda yang dipergunakan dalam penentuan isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan adalah metoda manajemen



strategis (Analisis SWOT) yang mencakup aspek-aspek kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman/tantangan (Threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan jika ternyata ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut akan dilakukan revisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS, Adapun hasil analisis KHLs dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 2.22
Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten Gowa

No	Ringkas KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	2	3	4
1.	Pengembangan teknologi tepat guna pertanian dalam meningkatkan kualitas pangan	Diperlukan bantuan /hibah teknologi tepat guna untuk menunjang peningkatan kualitas pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) atau Pengembangan Pangan Lestari (P2L)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.	Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	Diperlukan sosialisasi Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita perhari per tahun sesuai angka kecukupan gizi
3.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota	Diperlukan sosialisasi dan fasilitasi untuk menunjang penguatan mutu dan keamanan pangan	Program Penanganan Keamanan Pangan

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Lingkungan Analisis Internal

2.5.1. Kekuatan (Strength)

- a. Luas wilayah Kabupaten Gowa ± 1.883,33 km², terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan, meliputi 72,26 %



b. Dataran rendah dan hanya sekitar 27,74 % dataran rendah. Suhu berkisar antara 22 °C - 28 °C untuk dataran rendah, sedangkan dataran tinggi mempunyai suhu rata-rata 18 °C – 21 °C. Beberapa kekuatan sektor ketahanan pangan sebagai berikut:

1. Ketersediaan pangan di Kabupaten Gowa mengalami surplus utamanya komoditas padi, jagung.
2. Adanya peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib pemerintahan berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2012
4. Adanya standart penilaian kinerja.
5. Adanya dukungan program.
6. Adanya penggerak sebagai motivator.
7. Adanya dukungan pemerintah dan OPD terkait
8. Terbebtuknya kelembagaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama
9. Cukup tersedianya pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan lokal.

2.5.2. Kelemahan (Weakness)

1. Kurang optimalnya profesionalisme aparat.
2. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik.
3. Ketimpangan antara jumlah personil dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.
4. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai.
5. Ketimpangan antara jumlah personil dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.
6. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai.
7. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tantangan pentingnya pangan dan gizi yang seimbang beragam dan aman untuk dikonsumsi.
8. Masih terdapatnya masyarakat miskin di perdesaan sebagai akibat dari redahnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

2.5.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Analisis Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunity)

Beberapa peluang sektor ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan;



2. Potensi sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah kabupaten Gowa dan sepanjang waktu;
3. Tersedianya komoditas pangan lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok beras seperti jagung, ketelai, dan umbi-umbian lainnya;
4. Cukup banyak aneka produk pangan olahan non beras yang bisa dikembangkan;
5. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.
6. Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan.
7. Meningkatnya pemerintahan terhadap produk pangan
8. Adanya perubahan kecenderungan perilaku konsumen terhadap produk pangan olahan, aman untuk dikonsumsi
9. Budaya pangan organik

2.5.4 Ancaman/Tantangan (Threats)

Beberapa ancaman/tantangan sektor ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Tingkat Pengetahuan Sikap dan Keterampilan (PSK) masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan masih rendah;
2. Minat generasi muda umumnya dan keluarga muda khususnya terhadap bidang ketahanan pangan rendah;
3. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
4. Adanya persaingan kebutuhan/penggunaan air untuk sektor pertanian dan non pertanian (industri, pemukiman, dll);
5. Pemanfaatan lahan pekarangan yang belum optimal, mengingat wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan lahan kering;
6. Penerapan teknologi pengolahan pangan belum maksimal;
7. Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk-produk pangan belum dapat memenuhi permintaan pasar;
8. Kelembagaan perekonomian desa belum berfungsi optimal.
9. Masuknya produk pangan impor yang kompetitif
10. Fluktuasi harga bahan pangan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Gowa. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan bidang pangan adalah menurunnya ketersediaan pangan dari masih perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kualitas dan kemampuan daya beli (affordability). Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

- Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi harga pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan dan kelembagaan pangan
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten:
- Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi harga pangan:

Tabel : 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	a. Belum optimalnya penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	a. -Belum optimalnya konsumsi pangan lokal -Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan	a. - Pemahaman masyarakat akan konsumsi pangan lokal belum optimal - Kesadaran masyarakat akan pemanfaatan pekarangan masih kurang
2.	b. Belum optimalnya ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan	b. -Masih tingginya harga pangan utama -Terbatasnya akses pangan terutama di daerah terpencil	b. Kurangnya lumbung pangan masyarakat
3.	c. Belum optimalnya pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan	c. Kebutuhan Pangan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.	c. -Terbatasnya lembaga pemasaran pangan daerah -Terhambatnya jalur distribusi pangan



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

			-Terbatasnya system informasi pasar
4.	d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan cadangan pangan	d. Masih besarnya ketergantungan penyediaan pangan asal luar daerah (non beras)	d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial seperti lahan tidur, pekarangan rumah dan lahan dibawah tegalan hutan untuk penyediaan pangan sehingga masyarakat masih tergantung dengan pasar dan stok dan stok luar daerah
5.	e. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan pangan guna mengolah bahan pangan berbasis sumberdaya lokal.	e. Masyarakat masih menggunakan peralatan sederhana	e. Belum tersedianya peralatan untuk pengolahan pangan yang modern

Berdasarkan dari aspek kajian terbagi atas ketersediaan pangan, distribusi harga pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan. Dimana dalam undang-undang ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu dan bergizi, seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Berdasarkan table tersebut terdapat empat aspek yang menjadi dasar penentu permasalahan yaitu aspek arahan RPJMD, pelayanan perangkat daerah, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau mempengaruhi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan bidang urusan seperti pada table berikut ini:



Tabel: 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah (PD)

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Perangkat Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.	Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Melampaui (>)	Masih adanya pemasukan pangan dari luar provinsi	Peningkatan Ketersediaan dan produksi pangan
2.	Distribusi Pangan Secara Merata	Sesuai (=)	Masih kurangnya distribusi pangan	Peningkatan distribusi pangan
3.	Stabilnya harga pangan (gabah) tingkat produsen	Melampaui (>)	Masih kurang stabilnya harga pangan tingkat produsen	Peningkatan pemantau harga di tingkat produsen
4.	Stabilnya harga pangan (beras) tingkat konsumen	Melampaui (>)	Masih kurangnya harga pangan tingkat konsumen	Peningkatan pemantau harga di tingkat konsumen
5.	Cadangan pangan pemerintah daerah	Belum Tercapai (<),	Kurangnya tambahan cadangan pangan pemerintah	Peningkatan cadangan pangan
6.	Informasi Ketahanan Pangan yang Lengkap, Akurat dan Up to Date	Sesuai (=)	Belum akuratnya informasi pangan	Peningkatan Informasih Pangan
7.	Mutu konsumsi pangan Pola Pangan Harapan (PPH)	Sesuai (=)	Belum beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat	Terjaminnya dan terjangkaunya ketersediaan pangan masyarakat
8.	Konsumsi beras per kapita per tahun	Sesuai (=)	Belum seimbangya ketersediaan energi dan protein	Peningkatan ketesediaan pangan dan protein
9.	Ketersediaan pangan alternatif	Sesuai (=)	Masih kurangnya pangan alternatif	Peningkatan Ketersediaan pangan alternatif
10	Menurannya Daerah Rawan Pangan	Sesuai (=)	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan	Peningkatan pemantauan daerah rawan pangan
11	Pengawasan dan pembinaan pangan segar	Sesuai (=)	Masih ditemukan bahan berbahaya dalam pangan	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
12	Uji Lab. keamanan pangan segar cemaran biologis, kimia dan fisik	sesuai (=),	Belum beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat	Terjamin dan terjangkaunya ketersediaan pangan masyarakat



Masalah utama yang dihadapi adalah beberapa komoditas utama pangan belum mencukupi untuk menjamin ketersediaan pangan misalnya sebagian besar masih didatangkan dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk cadangan pangan dapat dipergunakan apabila terjadi kerawanan pangan misalnya karena bencana alam maupun untuk operasi pasar bila terjadi gejolak harga. Pengadaan cadangan pangan pemerintah masih terbatas sehingga apabila telah disalurkan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan maka cadangan pangan tersebut akan berkurang.

Produksi dan produktivitas tanaman pangan belum optimal disebabkan oleh faktor masih kurangnya prasarana dan sarana pertanian, kurangnya peningkatan kapasitas SDM petani, masih terbatasnya penerapan inovasi teknologi. Selain itu faktor iklim berupa banjir dan kekeringan serta serangan organisme pengganggu tanaman juga mempengaruhi produksi tanaman pangan.

Masih rendahnya produktivitas dan daya saing komoditas tanaman pangan strategis, hal ini disebabkan rendahnya harga sehingga perlu peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan melalui hilirisasi pertanian

Tabel: 3.3
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Melampaui (>)	Belum optimalnya peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan pangan
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	sesuai (=),	Belum optimalnya peningkatan diversifikasi pangan	Meningkatkan diversifikasi pangan



Tabel: 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam bidang perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya kualitas penganggaran dilingkungan pemerintah daerah;2. Masih adanya kendala efektivitas implementasi aplikasi system informasi keuangan dan anggaran;3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja.
2.	Permasalahan dalam bidang perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya;2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD;3. Bendahara pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban;4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran;5. Belum terintegrasinya system informasi kepegawaian dengan system informasi penggajian.
3.	Permasalahan dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat realisasi;2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;3. Masih belum terintegrasikannya system informasi akuntansi dengan aset.
4.	Permasalahan dalam bidang pengelolaan barang milik daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum;2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD;3. Masih belum terintegrasikannya system informasi aset dengan akuntansi.



3.2. Telaahan VISI dan MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 adalah “ **Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik** “. Dengan pengertian sebagai berikut:

- **Masyarakat yang Unggul**, diartikan Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu : lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.
- **Masyarakat yang Tangguh** diartikan Kondisi daerah dan masyarakat dengan berbasis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
- **Tata Kelola Pemerintahan Terbaik** diartikan Kondisi pemerintah yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan cara memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan. Misi mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah.



Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini misi pun akan terbagi dalam misi yang terkait dengan penataan wilayah, penanganan penduduk dan tata kelola pemerintahan.

Adapun misi Kabupaten Gowa ada 4 (empat) yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi;
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas;

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan
4. Pelaksanaan Administrasi di bidang pangan
5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama di bidang pangan.
6. Pelaksanaan pengelolaan UPTD
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan, secara umum tugas Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke -2 (dua) yaitu “ **Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi** ” Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka meningkatkan perekonomian berbasis



kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan Pangan di Daerah dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan di Daerah melalui ketersediaan pangan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal, tentunya dalam pencapaian misi kepala daerah terdapat permasalahan yang merupakan penghambat dan pendorong dalam pencapaian misi tersebut. Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan perangkat daerah yang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel : 3.5

**I. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Misi : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis Sumber daya Lokal dan Teknologi • Tujuan : Meningkatkan Daya saing Ekonomi Daerah berbasis Sumber daya Lokal dan Sektor Unggulan daerah • Sasaran : Meningkatkan Inovasi dan Nilai Tambah Sektor Komoditas Unggulan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Pemantapan Ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan ▪ Belum optimalnya pengembangan distribusi dan stabilisasi harga dan akses pangan ▪ Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap beras ▪ Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan cadangan pangan masyarakat ▪ -Masih tingginya harga pangan utama -Terbatasnya akses pangan terutama di daerah terpencil ▪ Peran lumbung pangan masyarakat sebagai penyangga cadangan pangan masyarakat desa masih belum optimalnya kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan • Belum optimalnya konsumsi pangan lokal -Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Lumbung masyarakat ▪ Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat ▪ Adanya dukungan Pemerintah terhadap keberadaan TokoTani Indonesia (TTI) ▪ -Pengembangan pangan pokok lokal -Peningkatan pemanfaatan pekarangan



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra terkait dengan tugas fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan

Aanalisis terhadap renstra K/L dan renstra Dinas Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keserasaian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada renstra Dinas Ketahanan Pangan, propinsi Sulawesi Selatan. Sasaran strategis yang termuat dalam Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota telah sinergi dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Sulawesi Selatan.

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah: "***Pertanian yang Maju, Mandiri dan Moderen untuk Terwujud Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong***"

Dengan Misi : 1. Mewujudkan Ketahanan Pangan; 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian; serta 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian. Berdasarkan visi dan misi tersebut maka *tujuan* pembangunan pertanian yang ingin dicapai antara lain yaitu: 1. Terwujudnya swasembada padi, jagung, kedelai; 2. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pangan; 3. Bergesernya budaya konsumsi pangan; 4. Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilitas harga; 5. Berkembangnya komoditas pertanian ekonomi; *Sasaran* strategis Kementerian Pertanian adalah: 1. Meningkatnya produksi padi, jagung, dan kedelai; 2. Terjaminnya distribusi pangan; 3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; 4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal;

Hasil telaahan Renstra Kementerian Pertanian dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel : 3.6

II. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
III. Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkanya ketersediaan beras /jagung	Terbatasnya anggaran yang diberikan dalam rangka pencapaian sasaran	Dampak perubahan iklim (bencana alam, banjir dan kekeringan)	Ketersediaan dukungan anggaran pembangunan
2.	Terjaminnya distribusi Pangan	Dukungan tehnologi belum optimal	Laju alih fungsi lahan makin meningkat	Komitmen pimpinan OPD dan Jajarannya dalam meningkatkan ketersediaan pangan
3.	Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi	Kurangnya data dan informasi	Menurunnya minat generasi muda terhadap usahatani	Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat
4.	Meningkatnya konsumsi pangan local	Harga bahan pangan masih berfluktuatif	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Ketersediaan sarana prasaran pendukung
5.	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan halal	Tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal



6	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan Beragam, bergizi, seimbang dan amana (B2SA) pangan berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
7	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumsi.	Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius dan masih ditemukannya kasus ketidakeamanan pangan	Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman	Telah dibentuknya Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah



3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Visi, misi dan program pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dibuat untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan mendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Visi ***“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Inklusif, Kompetitif dan Berkarakter”*** yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam misi 5 (lima) yaitu: ***“Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”*** dengan memperhatikan visi dan misi tersebut serta adanya perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa harus dapat mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi setiap aspek kajian, dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJM, arahan RTRW dan arahan KLHS. Telaahan terhadap visi, misi dan program pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel : 3.7

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Terjaminnya distribusi pangan	Dukungan teknologi belum optimal	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Dukungan pemerintah pusat dan propinsi
2.	Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi	Masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Tersedianya potensi sumber pangan lokal
3.	Meningkatnya konsumsi pangan lokal	Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel : 3.8

Permasalahan Pelayanan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian	Masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	Lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	Adanya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2	Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam	Masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	Belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	Adanya basis data terpadu kemiskinan
3	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Harga bahan pangan masih berfluktuatif	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Adanya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	masih tingginya presentase penduduk miskin/rawan pangan	belum teridentifikasinya penduduk miskin/rawan pangan	Adanya basis data terpadu kemiskinan
5	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
6.	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal	Tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal



Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari : 1) Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang; 2) Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam; 3) belum optimalnya kawasan strategis; 4) Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang; dan 5) Keterbatasan infrastruktur wilayah.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang secara tidak langsung akan berpengaruh pada rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal. Pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan produksi pangan.

Implikasi RTRW tentang kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah rawan bencana alam, memberikan ancaman terkait belum optimalnya kawasan strategis dan keterbatasan infrastruktur wilayah yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan yaitu : harga bahan pangan masih berfluktuatif, kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal dan keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan *serius*.

Dalam hal yang sama pula selanjutnya dilakukan hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :



Tabel : 3.9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang beragam	masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	Masih rendah kesadaran pelaku utama (petani) budidaya tanaman selain padi.	Adanya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3	Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan bencana alam dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi rawan pangan	Masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	Adanya basis data terpadu kemiskinan
4	Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan antara produksi pangan dan penduduk	Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal
5	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumsi.	Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius dan masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan	Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman	Telah dibentuknya Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis pelaksana tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan Negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas petani. Konsumsi pangan. Kelompok padi-padian sangat penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud menjadi sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut.

Konsumsi pangan belum beranekaragaman, adapun faktor penyebab belum berkembangannya adalah :

1. Belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,
 2. Belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,
 3. Belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal,
 4. Rendahnya citra pangan lokal,
 5. Belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective.
- Selain itu dari segi keamanan pangan juga membutuhkan perhatian, saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet dll) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya



industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun memerlukan sistem pencadanganpangan yang baik. Saat ini belum optimalnya:

1. sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal
2. 3 (tiga) bulan ,
cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
3. kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,
4. sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya.

Ketidak stabilan harga pangan disebabkan oleh sifat komoditas pangan yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. Faktor-faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok . Pada musim panen supply meningkat, sehingga harga relatif rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau di luar musim panen stok menjadi terbatas. Selain itu, permasalahan distribusi juga menjadi hambatan tersendiri pada masalah transportasi barang antar daerah. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidak efisienan dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan. Isu stabilitas harga pangan



penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang musim, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan semakin tidak menentu, dan sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis di bidang ketahanan pangan yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi kerawanan pangan dan sebagai penyangga perekonomian masyarakat desa.
2. Belum optimalnya peran kelembagaan pemasaran hasil pangan sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
3. Masih belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan SKPD Dinas Pangan Kabupaten Gowa yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Implikasi RTRW bagi pelaksana SKPD dan
5. Implikasi KLHAS bagi pelayanan SKPD



Tabel : 3.10
Perumusan Isu Strategis Pada
Perangkat Daerah

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW/KLHS	Isu-isu Strategis
1.	Permasalahan Dalam Bidang Perencanaan Dan Anggaran	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran	Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Harus Mendapatkan Opini WTP	Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik	PILAR SDGS Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola	Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Yang Berkualitas
2.	Permasalahan Dalam Bidang Perbendaharaan Daerah	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pengajuan Pembayaran		Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	Goals 16 Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh	
3.	Permasalahan Dalam Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD		Indikator	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	
4.	Permasalahan Dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah		Program Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berkualitas		



BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi *ke-2. Mempekokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi*

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, yaitu :

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengacu pada Visi Kabupaten Gowa yaitu “ *Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintah Terbaik* ” Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”.

Kata Kuncinya Sebagai Berikut :

- **Masyarakat yang Unggul:** Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religious, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif;
- **Masyarakat yang Tangguh:** Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas;
- **Tata Kelola Pemerintahan Terbaik :** Kondisi Pemerintahan yang dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan public yang berkualitas;
- **Mandiri Pangan :** Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau.
- **Kedaulatan Pangan :** Pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Gowa dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Gowa.



Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan di atas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan 4 (empat) Misi yang dua di antaranya berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa yaitu :

Misi 2. Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

Misi ini diarahkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2021–2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Kabupaten Gowa, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Gowa secara keseluruhan. *Tujuan Meningkatnya Ketersediaan dan Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Kelancaran Distribusi dan Kestabilan Harga Pangan serta Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan.* pada misi yaitu *Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi.* Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

Pangan Kabupaten Gowa beserta indikator kinerja dilihat pada tabel sebagai berikut ini :



Tabel : 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Gowa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan Melalui Kemandirian Pangan, Penanganan Kerwanan Pangan, Kelancaran Distribusi, Kestabilan Harga Pangan serta Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama Beras	173.886 Ton	174.886 Ton	175.886 Ton	176.886 Ton	177.886 Ton	178.886 Ton
			Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	86,56 Skor	90,1 Skor	90,2 Skor	90,3 Skor	90,4 Skor	90,5 Skor



Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap misi untuk mewujudkan Visi Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 2016 – 2021 Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Sebelum Perubahan :

Tujuannya : Meningkatkan Daya saing Ekonomi Daerah Berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah melalui peningkatan ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperkuat kemandirian Pangan masyarakat

Sasarannya : Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengolahan Pangan untuk Memperkokoh Kemandirian Pangan

Setelah Perubahan :

Tujuannya : Meningkatnya Ketersediaan dan Dversifikasi Pangan Melalui Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Kelancaran Distribusi, Kestabilan Harga Pangan serta Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasarannya : Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan

Rumus Indikator Kinerja Utama =

- Ketersediaan Pangan Utama Beras Yaitu :
$$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100$$
- Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Konsumsi Yaitu :
Skor PPh



Tabel : 4.2

Matriks Target Indikator SDGs/TPB Tahun 2021- 2026 Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Gowa

No. Indikator	Indikator	Satuan	Target 2020	Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1 *	Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment)	%	10	8	6	4	2	2	2
2.1.2 *	Prevelensi dengan kerawanan pangan Penanganan sedang atau daerah rawan pangan	%	25	20	15	10	5	5	5
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minumum dibawah 1400 kkl/kapita/hari	kapita	1778,9	1781,5	1782,6	1783,7	1784,2	1786,1	1788,08
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diidentifikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	skor	89,9	90,0	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5



TABEL : 4.3

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026
Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi pangan Melalui Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kelancaran Distribusi, Kestabilan Harga Pangan Serta Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan	Meningkatnya Stok Cadangan Pangan Pemerintah (100 Ton) serta Tertanganinya Daerah/Wilayah Rawan Pangan, Terpenuhinya Pola Pangan Harapan dan Terjaminnya keamanan pangan	Persentase	8.31	79.25	9.57	79.88	80.2	80.52



BAB V

STRTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Gowa mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 -2026 dengan efisien dan efektif.

Strategi merupakan suatu proses dalam manajemen yang sistematis dan didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi diperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun yang akan datang. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis organisasi perangkat daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor- faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) organisasi perangkat daerah. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

Adapun isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah saat ini dan dimasa datang adalah pandemic covid-19, revolusi industry 4.0, Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industry inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan, serta stunting, krisis pangan, perdagangan bebas, gender dan hak anak, disabilitas dan PMKS, serta layanan inklusif.

Adapun strategi pembangunan daerah yang tertuang dari misi 2 sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sector pertanian, pariwisata, dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat Pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
3. Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan social terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat dan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, yaitu :

Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal non beras serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang diversifikasi pangan melalui penerapan sistem pengolahan pangan (olah pangan).

Potensi (kekuatan) yaitu:

1. Adanya dukungan pemerintah dan OPD terkait
2. Terbentuknya kelembagaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama
3. Cukup tersedianya pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan lokal

Sedangkan kelemahan (kendala) yang ada yaitu:



1. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan dan gizi yang seimbang, beragam, seimbang dan aman
2. Masih terdapatnya masyarakat miskin di pedesaan sebagai akibat dari rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Faktor Internal Dan Eksternal

Tabel : 5.1
Faktor Internal Dan Eksternal

1.	Faktor Internal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya profesionalisme aparat. 2. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik. 3. Ketimpangan antara jumlah personil dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan. 4. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai. 5. Ketimpangan antara jumlah personil dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan. 6. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai. 7. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tantangan pentingnya pangan dan gizi yang seimbang beragam dan aman untuk dikonsumsi. 8. Masih terdapatnya masyarakat miskin di pedesaan sebagai akibat dari redahnya pendapatan dan daya beli masyarakat
2.	Faktor Eksternal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan; 2. Potensi sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah kabupaten Gowa dan sepanjang waktu; 3. Tersedianya komoditas pangan lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok beras seperti jagung, ketelai, dan umbiu-umbian lainnya; 4. Cukup banyak aneka produk pangan olahan non beras yang bisa dikembangkan; 5. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan. 6. Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan. 7. Meningkatnya pemerintahan terhadap produk pangan 8. Adanya perubahan kecenderungan perilaku konsumen terhadap produk pangan olahan, aman untuk dikonsumsi 9. Budaya pangan organik

Tabel : 5.2
Strength, Weakness, Oportunity, and Threats (SWOT)

Kekuatan (Strength)	Peluang (Oportunity)



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan pangan di Kabupaten Gowa mengalami surplus utamanya komoditas padi, jagung.• Bidang Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib pemerintahan• Adanya standart penilaian kinerja.• Adanya dukungan program.• Adanya dukungan pemerintah dan OPD terkait• Terbebtuknya kelembagaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama• Cukup tersedianya pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan lokal.	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan;• Tersedianya komoditas pangan lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok beras seperti jagung, ketelai, dan umbi-umbian lainnya;• Cukup banyak aneka produk pangan olahan non beras yang bisa dikembangkan;• Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.• Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan.• Meningkatnya pemerintahan terhadap produk pangan• Adanya perubahan kecenderungan perilaku konsumen terhadap produk pangan olahan yang sehat, aman untuk dikonsumsi• Budaya pangan organic
<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurang optimalnya profesionalisme aparat.• Kerjasama dan koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik.• Ketimpangan antara jumlah personil dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.• Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai.• Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai.• Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tantangan pentingnya pangan dan gizi yang seimbang beragam dan aman untuk dikonsumsi.• Masih terdapatnya masyarakat miskin di perdesaan sebagai akibat dari redahnya pendapatan dan daya beli masyarakat.	<p>Tantangan (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none">• Tingkat Pengetahuan Sikap dan Keterampilan (PSK) masyarakat dalam• mewujudkan ketahanan pangan masih rendah;• Minat generasi muda umumnya dan keluarga muda khususnya terhadap bidang ketahanan pangan rendah;• Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;• Adanya persaingan kebutuhan/ penggunaan air untuk sektor pertanian dan non pertanian (industri, pemukiman, dll);• Pemanfaatan lahan pekarangan yang belum optimal, mengingat wilayah• Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan lahan kering;• Penerapan teknologi pengolah pangan belum maksimal;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

	<ul style="list-style-type: none">• Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk-produk pangan belum dapat memenuhi permintaan pasar;• Kelembagaan perekonomian desa belum berfungsi optimal.• Fluktuasi harga bahan pangan
--	---

Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa (Sebelum Perubahan) sebagai berikut;

Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal non beras serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang diversifikasi pangan melalui penerapan sistem pengolahan pangan (olah pangan). Sedangkan Sesudah Perubahan Adalah Sebagai Berikut :

1. Peningkatan Akses Pangan (Beras) Kepada Masyarakat Terhadap Pangan yang berkualitas
2. Peningkatan Penanganan daerah/Wilayah yang Rentan rawan Pangan
3. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi berbasis Sumber daya Lokal
4. Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Gowa maka diperlukan kebijakan sebagai berikut :



Tabel : 5.3
Matriks Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Oppartunities (O) 1. Tingginya komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan; 2. Peran pemerintah menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar; 3. Potensi sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah kabupaten Gowa dan sepanjang waktu; 4. Tersedianya komoditas pangan lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok beras seperti jagung, ketelai, dan umbiu-mbian lainnya;	Strategi Kekuatan (SO) 1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan penganeekaragaman pangan lokal dengan menjamin ketersediaan untuk masyarakat. 2. Melakukan analisis dan program aksi penanganan wilayah rawan pangan dengan FSVA pada kerawanan pangan tingkat kecamatan dan desa. 3. Penguatan sistem kelembagaan pangan dengan melakukan pasar murah untuk stabilitas harga pangan pokok. 4. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi melalui, sosialisasi dan promosi konsumsi pangan lokal (non beras dan terigu) yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. 5. Mengembangkan dan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 6. Memantapkan pengawasan keamanan pangan segar	Strategi Kelemahan (WO) 1. Kurang optimalnya profesionalisme aparat. 2. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik. 3. Ketimpangan antara jumlah personil dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan. 4. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai. 5. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai. 6. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tantangan pentingnya pangan dan gizi yang seimbang beragam dan aman untuk dikonsumsi. 7. Masih terdapatnya masyarakat miskin di perdesaan sebagai akibat dari redahnya pendapatan dan daya beli masyarakat.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

<p>5. Cukup banyak aneka produk pangan olahan non beras yang bisa dikembangkan;</p> <p>6 Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.</p>		
<p>Tantangan Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belum seluruh potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah kabupaten Gowa dikelola secara optimal;2. Tingkat Pengetahuan Sikap dan Keterampilan (PSK) masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan masih rendah;3. Minat generasi muda umumnya dan keluarga muda khususnya terhadap bidang ketahanan pangan rendah;4. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;5. Adanya persaingan kebutuhan/penggunaan air untuk sektor pertanian dan non pertanian (industri, pemukiman, dll);6. Pemanfaatan lahan pekarangan yang belum optimal, mengingat wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan lahan kering;7. Penerapan teknologi pengolah pangan belum maksimal;8. Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk-produk pangan belum dapat memenuhi permintaan pasar;	<p>Strategi Ancaman (ST)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Pengetahuan Sikap dan Keterampilan (PSK) masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan masih rendah;2. Minat generasi muda umumnya dan keluarga muda khususnya terhadap bidang ketahanan pangan rendah;3. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;4. Adanya persaingan kebutuhan/ penggunaan air untuk sektor pertanian dan non pertanian (industri, pemukiman, dll);5. Pemanfaatan lahan pekarangan yang belum optimal, mengingat wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan lahan kering;6. Penerapan teknologi pengolah pangan belum maksimal;7. Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk-produk pangan belum dapat memenuhi permintaan pasar;8. Kelembagaan perekonomian desa belum berfungsi optimal.9. Masuknya produk pangan impor yang kompetitif10. Fluktuasi harga bahan pangan	<p>Strategi Kelemahan dan Anacam (WT)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan dan gizi yang seimbang beragam dan aman untuk dikonsumsi.2. Pemanfaatan lahan pekarangan yang belum optimal, mengingat wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan lahan kering;3. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik4. Tingkat Pengetahuan Sikap dan Keterampilan (PSK) masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan masih rendah;



9. Kelembagaan perekonomian desa belum berfungsi optimal.		
---	--	--

5. 1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan rumusan perencanaan komperenhensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efesien.

Untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan 2021 - 2026 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai



tujuan dan sasaran, maka di rumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut ;

Tabel : 5.4
Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah kebijakan
Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026

Visi : Terwujudkan Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik			
Misi : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor unggulan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing Ekonomi daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Inovasi Produktivitas dan Nilai Tabah Sektor Komoditas Unggulan daerah	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Sektor Unggulan	Peningkatan Penggunaan sarana Produksi dengan Menerapkan Sistem Pertanian Modern dan pengembangan Agro Industri Pengelahan Hasil pertanian dan perikanan

Tabel : 5.5
Visi, Tujuan, Sasaran dan arah Kebijakan Dinas ketahanan Pangan
(Sebelum Perubahan)
Kabupaten Gowa tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan melalui Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Daya saing Ekonomi Daerah berbasis Sumber daya Lokal dan sektor daerah melalui peningkatan Ketersediaan pangan yang terjangkau dan Aman untuk Pemenuhan Kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperkokoh kemandirian pangan masyarakat	Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengolahan Pangan untuk memperkokoh kemandirian Pangan	Meningkatkatkan Perekonomian daerah melalui Peningkatan Ketersediaan dan Diversifikasi pangan masyarakat melalui Penguatan Lumbung Pangan, Distribusi Pangan dan Pemanfaatan pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber Daya Lokal	pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal non Beras serta Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang diversifikasi Pangan Melalui Penerapan Sistem Pengolahan pangan (Olah pangan)



***Visi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan
(Setelah Perubahan)
Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026***

Visi : Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan melalui Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi pangan melalui Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kelancaran Distribusi, Kestabilan Harga Pangan Serta Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan	1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Distribusi, dan Stabilisasi Harga 2 Meningkatkan Kerawanan Pangan Pada Suatu Kondisi ketidak cukupan Pangan dan Gizi yang dialami oleh suatu Daerah/Wilayah Rawan Pangan 3 Meningkatkan Diversifikasi Pangan dan Gizi 4 Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1 Peningkatan Akses Pangan (Beras) Kepada Masyarakat Terhadap Pangan yang Berkualitas 2 Peningkatan Penanganan Terhadap Daerah/Wilayah yang rentan Rawan Pangan 3 Peningkatan penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber daya Lokal 4 Peningkatan Keamanan Pangan Segar



Tabel : 5.6
Perumusan Strategi dan arah Kebijakan sesuai dengan Tujuan, sasaran
Jangka Menengah SKPD
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Daya saing Ekonomi Daerah berbasis Sumber daya Lokal dan sektor daerah melalui peningkatan Ketersediaan pangan yang terjangkau dan Aman untuk Pemenuhan Kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperkokoh kemandirian pangan masyarakat	Meningkatnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengolahan Pangan untuk memperkokoh kemandirian Pangan	Meningkatkan Perekonomian daerah melalui Peningkatan Ketersediaan dan Diversifikasi pangan masyarakat melalui Penguatan Lumbung Pangan, Distribusi Pangan dan Pemanfaatan pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Perekonomian daerah melalui Peningkatan Ketersediaan dan Diversifikasi pangan masyarakat melalui Penguatan Lumbung Pangan, Distribusi Pangan dan Pemanfaatan pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber Daya Lokal	pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal non Beras serta Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang diversifikasi Pangan Melalui Penerapan Sistem Pengolahan pangan (Olah pangan)

Perumusan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tujuan, sasaran
jangka menengah SKPD
(Setelah perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Ketersediaan dan Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kelancaran Distribusi dan Kestabilan Harga Pangan Serta Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan	Meningkatnya Stok cadangan Pangan Pemerintah (100 Ton) Serta Tertanganannya Daerah/Wilayah Rawan pangan, Terpenuhinya Pola Pangan Harapan, dan Terjaminnya Keamanan Pangan	1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Distribusi, dan Stabilisasi Harga Pangan 2 Meningkatkan Kerawanan Pangan Pada Suatu Kondisi ketidak cukupan Pangan dan Gizi yang dialami oleh suatu Daerah/Wilayah Rawan Pangan 3 Meningkatkan Diversifikasi Pangan dan Gizi 4 Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1 Peningkatan Akses Pangan (Beras) Kepada Masyarakat Terhadap Pangan yang Berkualitas 2 Peningkatan Penanganan Terhadap Daerah/Wilayah yang rentan Rawan Pangan 3 Peningkatan penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber daya Lokal 4 Peningkatan Keamanan Pangan Segar



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, Gowa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib ketahanan pangan.

Dalam Perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pematapan ketahanan pangan di kabupaten gowa dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021, program dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Penanganan Keamanan Pangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi Dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Monitoring evaluasi kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan latihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4. Administrasi Umum perangkat daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan /Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas perorangan Oprasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Aset Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (surat keluar dan surat masuk)
- Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
-



2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

2.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan

Sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

3.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan lainnya Sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan berbasis Sumberdaya local
- Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)

3.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.3 Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

3.4 Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Per kapita per tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun



- Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Family Farmin)
- Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Per Kapita Per Tahun

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

4.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Masyarakat

- Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

4.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Keamanan Pangan

5.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

1. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran Rencana Strategis Pada Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut ;

1. Kelompok masyarakat
2. Kelompok Lumbung Pangan dan Gapoktan/Pokatan
4. Kelompok Wanita tani (KWT)



5. Tim PKK dan sebagainya

2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif adalah Patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk merencanakan program/kegiatan.

Program dan Kegiatan Pemantapan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa 2016-2021 yang di biyai oleh APBD Kabupaten merupakan Program Prioritas Kabupaten Gowa. Dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa 2021-2026. Mengacu pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2021-2026 jumlah biaya/dana yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:



Tabel : T.C 27

Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Program (outcam) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab				
								Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	12	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1.Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. 2.Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Layanan Penunjang SKPD																			
				2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	854.250.000	100%	862.792.500	100%	863.769.675	100%	872.407.372	100%	888.935.976	100%	897.825.335	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa	
				02.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketyersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	75.000.000	100%	75.750.000	100%	76.507.500	100%	77.272.575	100%	78.045.301	100%	78.825.754	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa	
				02.09.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	35.350.000	4 Dokumen	35.703.500	4 Dokumen	36.060.535	4 Dokumen	36.421.140	4 dokumen	36.785.332	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa	



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

			02.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	100%	1Laporan	25.000.000	1Laporan	25.250.000	1Laporan	25.502.500	1Laporan	25.757.525	1Laporan	26.015.100	1Laporan	26.275.251	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			02.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	100%	1Laporan	25.000.000	1Laporan	25.250.000	1Laporan	25.502.500	1Laporan	25.757.525	1Laporan	26.015.100	1Laporan	26.275.251	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			02.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	182.500.000	100%	184.325.000	100%	186.168.250	100%	188.029.933	100%	189.910.232	100%	191.809.334	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			02.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	28 Orang/Bulan	2.867.410.993	28 Orang/Bulan	2.867.410.993	28 Orang/Bulan	#####	30 Orang/Bulan	2.867.410.993	30 Orang/Bulan	2.867.410.993	30 Orang/Bulan	2.867.410.993	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			02.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	28 Orang	28.674.109	28 Orang	28.741.090	28 Orang	28.674.109	30 Orang	2.867.410.993	30 Orang	2.867.410.993	30 Orang	2.867.410.993	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			02.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	151.500.000	1 Dokumen	153.015.000	1 Dokumen	154.545.150	1 Dokumen	156.090.602	1 Dokumen	157.651.508	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			02.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.250.000	1 Laporan	25.502.500	1 Laporan	25.757.525	1 Laporan	26.015.100	1 Laporan	26.275.251	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

				02.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	90%	26.250.000	91%	26.512.500	92%	26.777.625	93%	27.045.401	95%	27.315.855	95%	27.589.014	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				02.09.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	28 Paket	26.250.000	28 Paket	26.512.500	30 Paket	26.777.625	35 Paket	27.045.401	40 Paket	27.315.855	40 Paket	27.589.014	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				02.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	85%	336.000.000	86%	339.360.000	87%	342.753.600	88%	346.181.136	89%	349.642.947	89%	353.139.377	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				02.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	15 Paket	15.000.000	15 Paket	15.150.000	20 Paket	15.301.500	20 Paket	15.454.515	20 Paket	15.609.060	20 Paket	15.765.151	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				02.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	30 Paket	25.000.000	30 Paket	25.250.000	30 Paket	25.502.500	30 Paket	25.757.525	30 Paket	26.015.100	30 Paket	26.275.251	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				02.09.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	2 Paket	7.500.000	2 Paket	7.575.000	2 Paket	7.650.750	2 Paket	7.650.750	2 Paket	7.727.258	2 Paket	7.804.530	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				02.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.535.000	2 Dokumen	3.570.350	2 Dokumen	3.606.054	2 Dokumen	3.642.114	2 Dokumen	3.678.535	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				02.09.01.2.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	120 Laporan	7.500.000	120 Laporan	7.575.000	120 Laporan	7.650.750	120 Laporan	7.727.258	120 Laporan	7.804.530	120 Laporan	7.882.575	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

			02.09.01.2.06.09	Pengyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	450 Laporan	250.000.000	450 Laporan	252.500.000	450 Laporan	255.025.000	450 Laporan	257.575.250	450 Laporan	260.151.003	450 Laporan	262.752.513	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan/Permeliharaan Barang Milik Daerah	100%	85%	130.000.000	86%	131.300.000	87%	132.613.000	88%	133.939.130	89%	135.278.521	89%	136.631.307	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			2.09.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	2 Unit	105.000.000	2 Unit	106.050.000	2 Unit	107.110.500	2 Unit	108.181.605	2 Unit	109.263.421	2 Unit	110.356.055	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.250.000	4 Unit	25.502.500	4 Unit	25.757.525	5 Unit	26.015.100	5 Unit	26.275.251	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	100%	15 Unit	27.000.000	3 Unit	28.250.000	15 Unit	29.502.500	15 Unit	30.015.100	15 Unit	30.357.525	15 Unit	30.657.525	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	85%	44.500.000	86%	44.945.000	87%	37.743.700	88%	38.121.137	90%	46.306.878	90%	46.769.947	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	750 Laporan	12.000.000	750 Laporan	12.120.000	750 Laporan	12.241.200	750 Laporan	12.363.612	750 Laporan	12.487.248	750 Laporan	12.612.121	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
			2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	100%	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.100.000	3 Laporan	10.201.000	3 Laporan	10.303.000	3 Laporan	10.406.040	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

				2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	100%	15 Laporan	15.000.000	15 Laporan	15.150.000	15 Laporan	15.301.500	15 Laporan	15.454.515	15 Laporan	15.609.060	15 Laporan	15.765.151	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	100%	15 Laporan	7.500.000	15 Laporan	7.575.000	15 Laporan	7.650.750	15 Laporan	7.727.258	15 Laporan	7.804.530	15 Laporan	7.882.575	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	86%	60.000.000	87%	60.600.000	88%	61.206.000	89%	61.818.060	90%	62.436.241	90%	63.060.603	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	3 Unit	12.500.000	3 Unit	12.500.000	3 Unit	12.500.000	3 Unit	12.500.000	3 Unit	12.500.000	3 Unit	12.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.100.000	5 Unit	10.201.000	5 Unit	10.303.010	5 Unit	10.406.040	5 Unit	10.510.101	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	9 Unit	35.000.000	9 Unit	35.350.000	9 Unit	35.703.500	9 Unit	36.060.535	9 Unit	36.421.140	9 Unit	36.785.352	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor Unggulan Daerah melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau dan aman untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, sehingga dapat Memperkokoh Kemandirian Pangan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengolaan pangan segar dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor Unggulan Daerah Melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau dan aman untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, sehingga dapat Memperkokoh	Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat																		
				2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100%	78%	563.894.129	79%	575.405.663	80%	591.130.220	81%	608.242.963	82%	626.490.252	82%	626.490.252	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.02.201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur yang Direalisasikan	100%	78%	563.894.129	79%	575.405.663	80%	591.130.220	82%	608.242.963	85%	626.490.252	85%	626.490.252	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.02.201.01	Penyediaan Infrastruktur Lambung Pangan	Jumlah Lambung Pangan yang Tersedia	100%	4 Unit	270.264.469	4 Unit	272.967.114	4 Unit	281.156.127	4 Unit	289.590.811	4 Unit	298.278.535	4 Unit	298.278.535	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.02.201.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	100%	4 Unit	60.000.000	4 Unit	61.800.000	4 Unit	62.116.387	4 Unit	63.358.715	4 Unit	65.259.476	4 Unit	65.259.476	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

				2.09.02.20103	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	100%	4 Unit	180.000.000	4 Unit	18.5400.000	4 Unit	190.962.000	4 Unit	196.690.860	4 Unit	202.591.586	4 Unit	202.591.586	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.02.20104	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	100%	1 Laporan	53.629.660	1 Laporan	55.238.550	1 Laporan	56.895.706	1 Laporan	58.602.577	1 Laporan	60.360.655	1 Laporan	60.360.655	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
		Meningkatnya Keanekaragaman Pangan Masyarakat	Menyesuaikan dengan Pola Pangan Harapan (PPH)	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Produk Pangan Yang Dikonsumsi Masyarakat : Produk Pangan Alternatif	100%	14%	500.766.489	14%	517.560.428	14%	526.522.862	14%	540.200.096	14%	550.022.425	14%	591.722.699	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilitas	Persentase Stok Pasokan dan harga Pangan sesuai Kebutuhan Kabupaten	100%	80%	182.370.340	81%	189.341.450	82%	195.021.694	83%	200.872.345	85%	206.898.515	85%	206.898.515	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.20101	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100%	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.600.000	2 Laporan	31.518.000	2 Laporan	32.463.540	2 Laporan	33.437.446	2 Laporan	33.437.446	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.20102	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	100%	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.200.000	1 Laporan	20.806.000	1 Laporan	21.430.180	1 Laporan	22.073.085	1 Laporan	22.073.085	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.20103	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	1 Laporan	22.370.340	1 Laporan	23.041.450	1 Laporan	23.732.694	1 Laporan	24.444.675	1 Laporan	25.178.015	1 Laporan	25.178.015	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

				2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	100%	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	21.000.000	3 Dokumen	21.630.000	3 Dokumen	22.278.900	3 Dokumen	22.947.267	3 Dokumen	22.947.267	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	100%	5 Unit	20.000.000	7 Unit	21.000.000	10 Unit	21.630.000	10 Unit	22.278.900	10 Unit	22.947.267	10 Unit	22.947.267	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.01.06	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	100%	0 Kelompok	150.000.000	0 Kelompok	150.000.000	0 Kelompok	150.000.000	20 Klp	150.000.000	20 Klp	150.000.000	20 Klp	80.315.435	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Stok Cadangan Pangan	100%	100%	134.766.489	100%	142.153.021	100%	143.574.552	100%	149.521.869	100%	151.419.969	100%	5.516.709.204	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100%	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	21.000.000	3 Laporan	21.210.000	3 Laporan	21.422.100	3 Laporan	21.636.321	3 Laporan	21.852.684	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	10 Ton	90.000.000	20 Ton	94.500.000	30 Ton	95.445.000	40 Ton	96.399.450	50 Ton	97.363.445	60 Ton	98.337.079	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	100%	10 Ton	24.766.489	20 Ton	26.653.021	30 Ton	26.919.552	40 Ton	31.700.319	50 Ton	32.420.203	60 Ton	5.396.519.440	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

				2.09.03.2.03	Pentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase Komoditas Pangan Lokal yang Ditetapkan Harganya	100%	100%	30.000.000	100%	30.900.000	100%	31.209.000	100%	31.521.090	100%	31.836.301	100%	32.154.664	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	100%	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.900.000	1 Laporan	31.209.000	1 Laporan	31.521.090	1 Laporan	31.836.301	1 Laporan	32.154.664	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Jumlah Dokumen Angka Ketersediaan Energi (Kilo Kalori Perkapita PerTahun	100%	85%	153.629.660	86%	155.165.957	87%	156.717.616	88%	158.284.792	90%	159.867.640	90%	161.466.317	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	100%	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.350.000	1 Dokumen	35.703.500	1 Dokumen	36.060.535	1 Dokumen	36.421.140	1 Dokumen	36.785.352	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100%	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	100%	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.250.000	1 Laporan	25.502.500	1 Laporan	25.757.525	1 Laporan	26.015.100	1 Laporan	26.275.251	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Menyesuaikan dengan Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa/Kel Rawan Pangan / Jumlah Desa dan Kelurahan	100%	100	110.000.000	46%	111.100.000	44%	112.211.000	42%	113.333.110	40%	114.466.441	40%	115.611.106	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penanganan dan Kerawanan Pangan	100%	100%	35.000.000	100%	35.350.000	100%	35.703.500	100%	36.060.535	100%	36.421.140	100%	36.785.352	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.04.2.01.01	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	100%	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.350.000	1 Dokumen	35.703.500	1 Dokumen	36.060.535	1 Dokumen	36.421.140	1 Dokumen	36.785.352	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan Yang Dilakukan	100%	100%	75.000.000	100%	75.750.000	100%	76.507.500	100%	77.272.575	100%	78.045.301	100%	78.825.754	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.04.2.02.01	Kordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	100%	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.250.000	1 Laporan	25.502.500	1 Laporan	25.757.525	1 Laporan	26.015.100	1 Laporan	26.275.251	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

		Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Bebas cemaran Fisik, Biologi dan Kimia	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Sampel Pangan yang Aman/Jumlah Total Sampel Pangan	100%	81%	120.000.000	82%	123.600.000	82%	127.308.000	83%	131.127.240	83%	135.061.057	83%	139.112.889	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase Kecamatan yang Menjadi Target Pengawasan dalam Setahun	100%	100%	120.000.000	100%	123.600.000	100%	127.308.000	100%	131.127.240	100%	135.061.057	100%	139.112.889	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	100%	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.750.000	2 Dokumen	26.522.500	2 Dokumen	27.318.175	2 Dokumen	28.137.720	2 Dokumen	28.981.852	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3 Sertifikat	20.000.000	3 Sertifikat	20.600.000	3 Sertifikat	21.218.000	3 Sertifikat	21.854.540	3 Sertifikat	22.510.176	3 Sertifikat	23.185.481	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.450.000	5 Dokumen	15.913.500	5 Dokumen	16.390.905	5 Dokumen	16.882.632	5 Dokumen	17.389.111	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

				2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.750.000	2 Dokumen	26.522.500	2 Dokumen	27.318.175	2 Dokumen	28.137.720	2 Dokumen	28.981.852	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa
				2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	36.050.000	1 Dokumen	37.131.500	1 Dokumen	38.245.445	1 Dokumen	39.392.808	1 Dokumen	40.574.593	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Gowa

Sungguminasa, 15 Juni 2023

Kepala Dinas



H. Syamhari Rasyid, S.Ag. SH

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19770917 200312 1 001



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PANGAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 terkait dengan bidang ketahanan pangan yaitu Ketersediaan Pangan Utama Beras, Ketersediaan pangan Utama Jagung, dan Mutu konsumsi pangan sesuai pola Pangan harapan.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa mengacu pada tujuan Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung pencapaian IKU Dinas Ketahanan Pangan selama periode yang



sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah yang akan datang sebagai berikut :



TABEL : T-C.28

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal 2021	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ketersediaan Pangan Utama Beras	173.886 Ton	173.886 Ton	174.886 Ton	175,886 Ton	176.886 Ton	178.886 Ton	179.886 Ton	179,886 Ton
2.	Ketersediaan Pangan Utama Jagung	179.500 Ton	179.500 Ton	217.250 Ton	249.830 Ton	287.300 Ton	295.200 Ton	301.600 Ton	301.600 Ton
4.	Mutu Konsumsi Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	89,56 Skor	89,56 Skor	90,1 Skor	90,2 Skor	90,3 Skor	90,4 Skor	90,5 Skor	90,5 Skor



INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026
(Sesudah Perubahan)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal 2021	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ketersediaan Pangan Utama Beras	173.886 Ton	173.886 Ton	174.886 Ton	175,886 Ton	176.886 Ton	178.886 Ton	179.886 Ton	179,886 Ton
4.	Mutu Konsumsi Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	89,56 Skor	89,56 Skor	90,1 Skor	90,2 Skor	90,3 Skor	90,4 Skor	90,5 Skor	90,5 Skor



Tabel. T-C.29
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN
(Sebelum Perubahan)
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal 2021	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ketersediaan Pangan Utama Beras	173,886 Ton	173.886 Ton	174.886 Ton	175.886 Ton	176.886 Ton	177.886 Ton	178.886 Ton	178.886 Ton
2.	Ketersediaan Pangan Utama Jagung	197.500 Ton	197.500 Ton	217.500 Ton	249.830 Ton	287.300 Ton	295.200 Ton	301.600 Ton	301.600 Ton
4.	Mutu Konsumsi Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	89,56 Skor	89,56 Skor	90,1 Skor	90,2 Skor	90,3 Skor	90,4 Skor	90,5 Skor	90,5 Skor



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN

(Setelah Perubahan)

KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal 2021	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ketersediaan Pangan Utama Beras	173,886 Ton	173.886 Ton	174.886 Ton	175.886 Ton	176.886 Ton	177.886 Ton	178.886 Ton	178.886 Ton
2.	Mutu Konsumsi Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	89,56 Skor	89,56 Skor	90,1 Skor	90,2 Skor	90,3 Skor	90,4 Skor	90,5 Skor	90,5 Skor



BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, merupakan pedoman bagi para pengelola dan penyelenggara kegiatan peningkatan ketahanan pangan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam kurun waktu Tahun 2021- 2026. Rencana Strategis ini juga akan memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan ketahanan pangan.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa

Rencana strategis ini akan berhasil guna dan berdaya guna dilaksanakan apabila mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh aparat Dinas Ketahanan Pangan dan pihak terkait, baik unsur pemerintah maupun dari masyarakat dan pelaku agribisnis lainnya. Semoga rencana strategis ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,
Demikian pembangunan ketahanan pangan di kabupaten Gowa

Sungguminasa, 15 Juni 2023

Kepala Dinas



H. Syamhari Rasyid, S.Ag. SH
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19770917 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Andi Mallombasang No. 46 Sungguminasa Kab. Gowa
